



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



(0371) 2620594



infobnn_kab_sumbawa



info BNN Kabupaten Sumbawa



infobnn_kab_sumbawa



Bnn Sumbawa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja BNNK Sumbawa Tahun 2024 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, BNNK Sumbawa sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke BNN RI dan diteruskan kepada Presiden RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK Sumbawa. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNK Sumbawa melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah berpedoman pada rencana strategis lembaga sebagai penjabaran visi dan misi organisasi.

Secara umum Sasaran Strategis BNNK Sumbawa yang telah ditetapkan, telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Namun demikian juga masih terdapat target kinerja yang belum mencapai hasil secara optimal, tentunya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa mendatang.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BNNK Sumbawa dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan; serta dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN dimasa mendatang.

Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua Amin.

Sumbawa Besar, 14 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Sumbawa



Denny Priadi, S.Sos

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA

BNNK SUMBAWA TAHUN 2024

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNK Sumbawa melaksanakan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.
2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Realiasi target kinerja kedua program tersebut diimplementasikan melalui 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan, dengan kriteria capaian sebagai berikut:

- a. Capaian di atas 100% sebanyak = 7 Indikator Kinerja Kegiatan;
- b. Capaian 90 s/d 100% sebanyak = 3 Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. Capaian 80 s/d 89% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- d. Capaian 70 s/d 79% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- e. Capaian 60 s/d 69% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- f. Capaian 50 sd 59% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- g. Capaian dibawah 50% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan.

Gambaran capaian strategis BNNK Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba target 52 tercapai sebesar 52,70 (101%).
 - b. Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba target 83,125 tercapai sebesar 79,286 (95,3%).
 - c. Indeks kemandirian partisipasi target 3,49 tercapai sebesar 3,54 (101%).
2. Bidang Rehabilitasi dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup target 68% tercapai sebesar 86,67% (126%)

- b. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target 10 orang tercapai 10 orang (100%).
 - c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional target 1 Lembaga tercapai sebanyak 2 lembaga (200%).
 - d. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional target 2 unit tercapai sebesar 2 Unit (100%).
 - e. Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi BNN target 3,29 tercapai sebesar 3,9 (118%).
3. Bagian Umum dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
- a. Nilai Kinerja Anggaran BNN target 87 tercapai sebesar 99,5 (114%).
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN target 97,41 tercapai sebesar 98,99 (101%).

Upaya pencaian target kinerja BNNK Sumbawa, dilakukan dengan mendorong kinerja Satuan Kerja (Satker) melalui pembinaan teknis operasional yang berdampak pada semakin berfungsinya sistem kinerja yang dibangun serta peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi dan semakin timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Berdasarkan evaluasi bahwa kinerja Satker setiap tahunnya sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama seksi pemberantasan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala keterbatasan tersebut diatas dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di BNNK Sumbawa serta melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dan juga dengan Polres setempat untuk bantuan personil guna mendukung kebutuhan organisasi, bila masih belum mencukupi akan dilakukan penambahan personil tenaga yang dipekerjakan.

Pagu anggaran BNNK Sumbawa tahun 2024 sebesar **Rp. 1.871.704.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 1.862.118.465,-** persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar **99.49%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja	5
B. Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Analisis Capaian Sasaran	10
B. Akuntabilitas Keuangan.....	47
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Pengukuran Kinerja Outcome.....	51
C. Pengukuran Kinerja Anggaran.....	52
D. Langkah yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja.....	52
Lampiran I Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa TA 2024	54
Lampiran II Data Dukung Lainnya	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (BNNK) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/ Kota.

Strategi yang dilakukan oleh BNNK Sumbawa dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkoba melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Alternatif dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat dan Pascarehabilitasi, Pemberantasan melalui pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Pelaksanaan Operasi Bersinar, serta Laporan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, BNNK Sumbawa sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban melaporkan

kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor Sumbawa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

2. Fungsi Organisasi

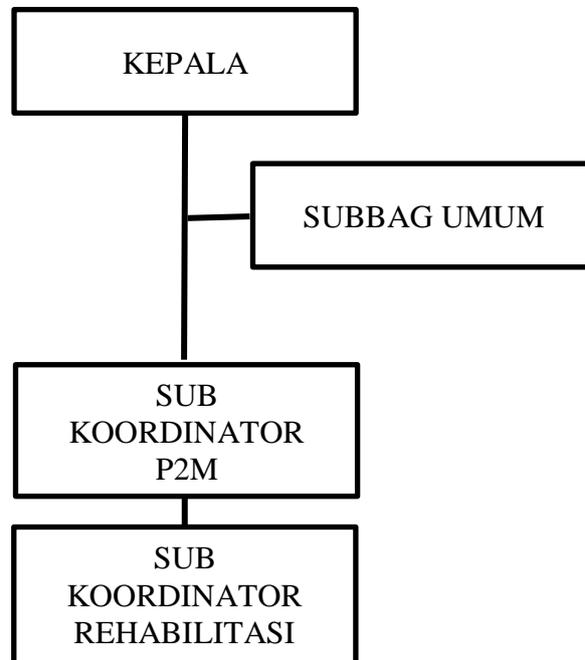
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Masyarakat dan Swasta
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK; dan
- f. Pelayanan administrasi BNNK.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNNK Sumbawa : Denny Priadi, S.Sos.
2. Kepala Subbag Umum : Ahmady, A.Md.
3. Sub Koordinator P2M : Nursyafruddin, A.Md.
4. Sub Koordinator Rehabilitasi : Ellyah Andriany, S.KM.

STRUKTUR ORGANISASI BNNK SUMBAWA



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja

Renstra BNN Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (selanjutnya disebut P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Visi : “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi :

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan penyalahgunaan Narkoba secara Profesional;
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas kelembagaan.

Tujuan :

- 1) Melindungi dan menyelematkan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba;
- 2) Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

BNNK Sumbawa sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024.

Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2020 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2024.

Renstra BNN tahun 2020-2024 dituangkan dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Provinsi NTB Tahun 2020-2024. Adapun Matrik Rencana

Program Kerja BNN Provinsi NTB Tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel berikut :

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	-	50	51	51	52
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	-	78,67	78,80	78,80	83,125
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	2	3,42	3,20	3,25	3,49
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase panyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	-	-	60%	68%
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	-	-	5	10

6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	2	1	1	1
7	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1	1	1	2	2
8	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi BNN	-	3,20	3,20	3,30	3,29
9	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	88	90	91	92	87
10	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	94	95	92	97,41

B. Perjanjian Kinerja

Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2024 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (outcome), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Begitu juga dengan BNNK Sumbawa, ada perjanjian antara pimpinan satker yakni Kepala BNNK Sumbawa dengan pimpinan tertinggi BNN yakni Kepala BNN.

Adapun Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Kementerian/Lembaga : BNNK Sumbawa

Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	83,125 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,49 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase panyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit

8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi BNN	3,29 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,41 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Capaian kinerja BNNK Sumbawa merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara *cascading* turun hingga ke level bawah di BNN Kabupaten/Kota di jajarannya.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa Tahun 2024 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan **7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan melebihi target, 2 (dua) indikator kinerja kegiatan tercapai sesuai target dan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan di bawah target.**

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 10 (sepuluh) sasaran strategis tahun 2024 dan penjelasan hasil capaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52 Indeks	52,70 Indeks	101%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	83,125 Indeks	79,286 Indeks	95,3%

3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,49 Indeks	3,54 Indeks	101%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	86,67%	126%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	2 Lembaga	200%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi BNN	3,29 Indeks	3,9 Indeks	118%
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	87 Indeks	99,5 Indeks	114%
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,41 Indeks	98,99 Indeks	101%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNK Sumbawa selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52	52,70	101%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu :

- 1) Menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- 2) Kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi” dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :
 - b.1 **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
 - b.2 **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;

b.3 **Reaching Out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 52 indeks dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 52,70 atau sebesar 101%.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52	52,70	Tinggi

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari tercapainya target indeks ketahanan diri remaja tahun 2024 yaitu 52,70 indeks. Berdasarkan klasifikasi hasil capaian sebagai berikut:

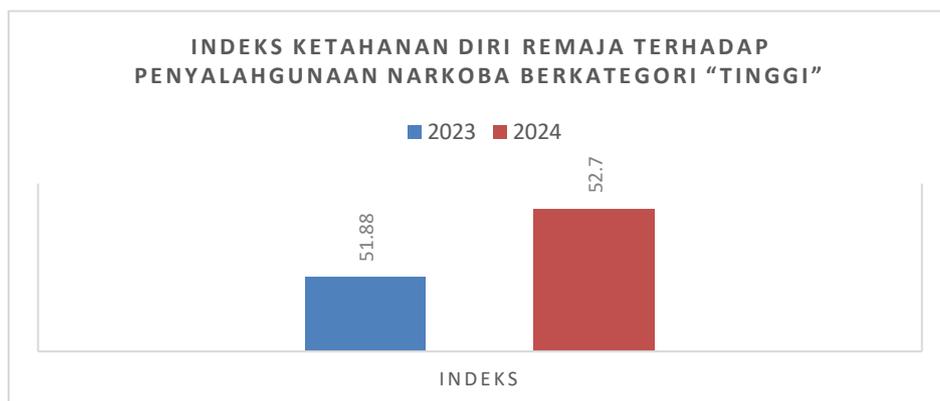
- a. Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$)
- b. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
- c. Kategori Rendah (45,98 – 49,73)
- d. Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$)

Berdasarkan hasil yang diperoleh, Indeks ketahanan diri remaja ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan hasil indeks adalah adanya pemahaman dan pengetahuan remaja yang baik tentang Ketahanan Diri Remaja dalam masalah Narkotika saat dilaksanakan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui Dialog Interaktif Remaja.

Selain itu, beberapa kegiatan informasi dan edukasi yang telah dilaksanakan tahun 2024 yang mendukung meningkatnya capaian indeks ketahanan keluarga di Kabupaten Sumbawa adalah dialog interaktif remaja, softskill di lingkungan SMP/SMA, kampanye/pagelaran seni, Informasi dan

edukasi melalui pemanfaatan media luar ruang, dan insert konten. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah tingkat SMPN dan SMAN/SMKN wilayah Kabupaten Sumbawa, masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 jumlah Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”, mengalami kenaikan capaian pada tahun 2024.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNNK Sumbawa (Renproja tahun 2020 - 2024) hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja (IKR) BNNK Sumbawa tahun 2024 sebesar 52,70 (Kategori Tinggi) atau 101%, telah melebihi dari standar yang ditetapkan secara nasional yaitu sebesar 52 (Kategori Tinggi). Hal ini tidak terlepas dari adanya sinergi dengan stake holder terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat serta keterlibatan pihak sekolah dalam mendukung pelaksanaan program BNN.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi kinerja BNNK Sumbawa tahun 2024 dalam indikator kinerja kegiatan “Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)” jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

NO	WILAYAH	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	Nasional	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52	52,04
2	Kabupaten Sumbawa				52,70

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja BNNK Sumbawa mendapatkan nilai sebesar 52.70. Hasil tersebut lebih tinggi dari capaian realisasi kinerja indeks ketahanan diri remaja secara nasional sebesar 52.04 .

BNNK Sumbawa akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan anak dan remaja secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2025 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- a. Pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika dilakukan secara masif dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sehingga hasil yang di peroleh dengan kategori tinggi.
- b. Kegiatan pengembangan soft skill pada remaja di SMP/SMU sederajat dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika dilakukan secara masif dan berkesinambungan sehingga indeks ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa masuk dalam kategori tinggi;
- c. Terbangunnya kesadaran di lingkungan pendidikan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program dan anggaran dana sekolah seperti sosialisasi bahaya narkoba saat masa orientasi sekolah pada siswa baru;

- d. Terjalannya hubungan baik melalui koordinasi intens yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sumbawa dengan institusi/lembaga pemerintah, swasta, komponen masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Masih ada beberapa peserta yang kurang aktif saat pelaksanaan.
- b. Pertanyaan kuisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja yang terkadang sulit dipahami oleh beberapa siswa;
- c. Masih ada beberapa institusi/ lembaga yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan P4GN;
- d. Kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNN Kabupaten Sumbawa sebagai pihak penyelenggara.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a. Sumber daya Manusia

Ditengah keterbatasan SDM, BNNK Sumbawa berupaya untuk mengoptimalkan kinerja sesuai dengan matrik peran hasil yang telah dibuat. Kedepannya diperlukan lagi penambahan jumlah penyuluh narkoba untuk lebih memaksimalkan kegiatan sosialisasi P4GN dimasyarakat serta peningkatan kapasitas tenaga penyuluh melalui diklat yang diperlukan dan menggantikan PNS yang pensiun di akhir tahun 2024.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki cukup memadai seperti Gedung Kantor berstatus Hak Milik BNN dan memiliki aula pertemuan, namun beberapa alat pengolah data dan alat peraga jenis narkoba berstatus rusak serta rata-rata sudah berumur lebih dari 5 tahun.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

- a. Koordinasi yang perlu ditingkatkan lagi sehingga proses pelaksanaan dari pemetaan sehingga pelaksanaan dapat dilaksanakan lebih baik lagi.
- b. Pertanyaan kuisisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja untuk kedepannya bisa dibuat lebih simpel, jelas, dan mudah dipahami;
- c. Menjalin kerja sama yang baik lagi dengan semua komponen baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam upaya meningkatkan ketahanan diri remaja dari penyalahgunaan narkoba;
- d. Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait.

2.

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	83,125	79,286	95,3%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah kabupaten/kota adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal di suatu kabupaten/kota.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah kabupaten dengan kriteria yaitu :

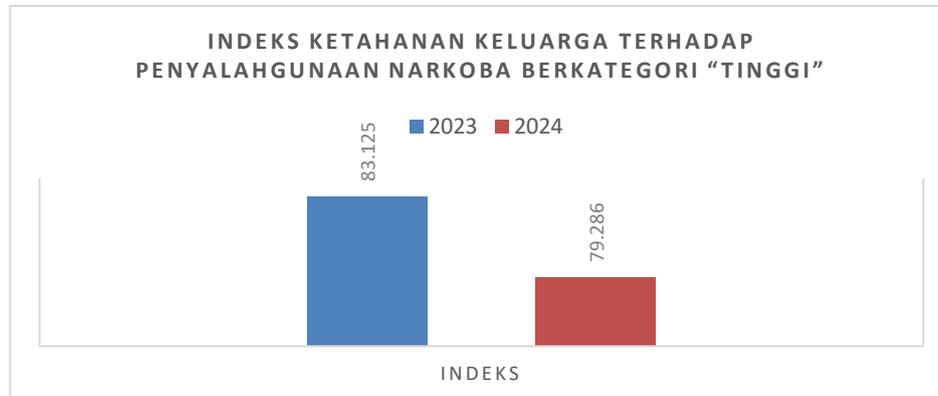
- a. Menghitung jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di kabupaten;
- b. Kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori “Tinggi” dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (Strengths and Difficulties Questionares), PAFAS (Parent And Familiy Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). Setiap BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2024;
- c. Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :
 - c.1 kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
 - c.2 kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
 - c.3 kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
 - c.4 kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 83,125 indeks dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 79,286 atau sebesar 95,3%.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	83,125	79,286	Tinggi

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” mengalami penurunan capaian pada tahun 2024.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNNK Sumbawa (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi tahun 2024.

Hasil capaian indeks ketahanan keluarga BNNK Sumbawa Tahun 2024 sebesar 79,286 (Kategori Tinggi) atau 95,3% di bawah dari standar yang ditetapkan yaitu sebesar 83,125 (Kategori Tinggi), hal ini dikarenakan kurang selektifnya saat melakukan pemetaan peserta sehingga ada beberapa peserta yang belum paham mengenai program ketahanan keluarga anti narkoba.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi kinerja BNNK Sumbawa tahun 2024 dalam indikator kinerja kegiatan “Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)” jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

NO	WILAYAH	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	Nasional	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	83,125	86,787
2	Kabupaten Sumbawa				79,286

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja BNNK Sumbawa sebesar 79,286%. Hasil tersebut lebih rendah dari realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga secara nasional sebesar 86.787%. BNNK Sumbawa akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2025 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari capaian realisasi kinerja secara nasional.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- a. Koordinasi yang baik telah dilakukan dengan pemerintahan desa BERSINAR, sehingga dalam pemetaan peserta berjalan lancar dan peserta yang mengikuti kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Adanya dukungan dari unsur perangkat desa terhadap pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sumbawa di wilayah Kabupaten Sumbawa;
- c. Antusiasme orang tua murid dari kegiatan dialog interaktif keluarga sangat kuat dengan mendampingi anaknya pada kegiatan berlangsung dan mendukung program P4GN.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah kurang selektifnya saat melakukan pemetaan peserta, sehingga ada beberapa peserta yang belum paham mengenai program ketahanan keluarga

anti narkoba dan juga pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, sehingga kegiatan terlalu dekat jarak pelaksanaannya dengan kegiatan selanjutnya.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a. Sumber Daya manusia

Demi lancarnya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan koordinasi dan sinergi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terutama Kesbangpol, Pokja 1 Tim penggerak PKK dan aparat kelurahan/desa bersinar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi ketahanan keluarga dan penentuan peserta kegiatan intervensi ketahanan keluarga di Kabupaten Sumbawa.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki cukup memadai seperti Gedung Kantor berstatus Hak Milik BNN dan memiliki aula pertemuan, namun beberapa alat pengolah data dan alat peraga jenis narkoba berstatus rusak serta rata-rata sudah berumur lebih dari 5 tahun.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah lebih fokus dalam pembuatan timeline kegiatan, sehingga pada saat pelaksanaan sesuai dan hasil yang di peroleh bisa lebih baik lagi.

3.	Sasaran : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kemandirian partisipasi	3,49	3,54	101%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri” di wilayah provinsi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi kategori “Sangat Mandiri” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :
 - a.1. **SDM**; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan pegiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
 - a.2. **Metode**; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
 - a.3. **Anggaran**; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
 - a.4. **Material**; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
 - a.5. **Sistem (Kebijakan)**; adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
 - a.6. **Aktivitas**; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Pegiat Anti Narkoba.
- b. Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :
 - b.1 IKP 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
 - b.2 IKP 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri

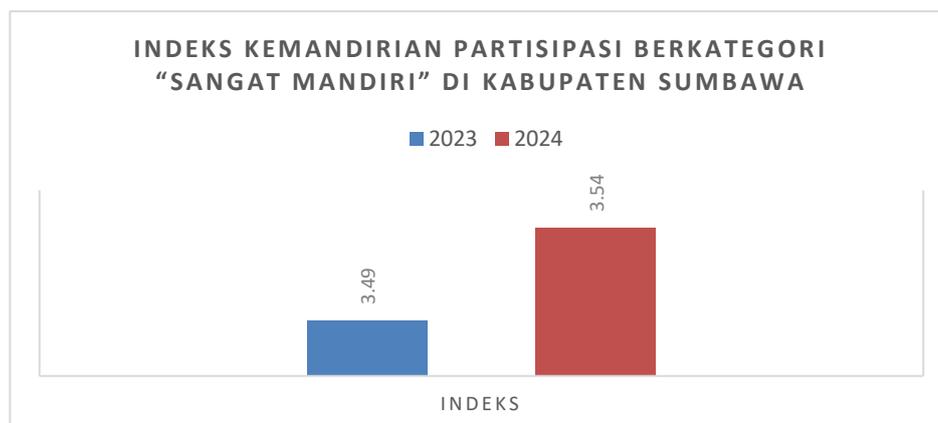
- b.3 IKP 2,51 – 3,25 : Mandiri
- b.4 IKP 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri
- c. Kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri” di wilayah Kabupaten sebanyak 3,49 dapat terealisasi sebanyak 3,54 atau sebesar 101%.

DATA CAPAIAN DAN HASIL IKP TAHUN 2024											
NO	SATKER	CAPAIAN ADVOKASI LEMBAGA				JUMLAH	HASIL IKP				IKP
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	
133	6 BNN Kabupaten Badung	1	0	1	0	2	3.93	3.87	0	0	3.90
134	7 BNN Kab Buleleng	1	0	1	0	2	3.35	0	3.64	0	3.50
135	1 BNNP NTB	0	0	1	1	2	0	0	3.4	3.3	3.35
136	2 BNNK Sumbawa Barat	0	0	1	1	2	0	0	3.57	3.52	3.55
137	3 BNNK Sumbawa	1	0	1	0	2	3.33	0	3.74	0	3.54
138	4 BNNK Mataram	1	0	0	1	2	3.92	0	0	3.84	3.88
139	5 BNNK Bima	1	0	1	0	2	3.74	0	3.8	0	3.77

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri” di wilayah Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan capaian pada tahun 2024.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Hasil capaian Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri” di wilayah kabupaten Sumbawa tahun 2024 sebesar 3,54. Hal tersebut melebihi target sebesar 3,49 atau sebesar 101%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian indikator Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri” di wilayah kabupaten Sumbawa dibandingkan pada level nasional merupakan akumulasi jumlah kabupaten/kota berkategori “Mandiri di seluruh unit kerja BNNP dan BNNK di wilayah Republik Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- a. Terjalannya hubungan baik melalui koordinasi intens yang dilakukan oleh BNNK Sumbawa dengan institusi/lembaga pemerintah, swasta, komponen masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.
- b. Semakin tumbuhnya kepedulian, kesadaran masyarakat, dan memandang bahwa permasalahan Narkoba menjadi persoalan bersama yang harus segera diatasi;
- c. Partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.
- d. Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Beberapa kabupaten/kota masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan;

- b. Kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a. Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai kinerja dibidang pemberdayaan masyarakat, BNN Provinsi NTB memaksimalkan SDM yang ada dan melakukan koordinasi serta sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB terutama Badan Kesbangpol sehingga target indikator Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi dapat tercapai.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah mobil operasional Dayamas yang diberikan oleh BNN pusat.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi serta kerjasama yang lebih intensif bagi lingkungan dalam melaksanakan kegiatan P4GN dan terus melakukan sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.

4.	Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	86,67%	126%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba memiliki persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalannya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya dengan harapan, standard dan tujuan yang telah ditetapkan oleh individu. Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki capital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat, produktif, dan bermakna.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Klien mengisi sendiri form WHOQoL-BREF yang sudah disediakan petugas;
- b. Dilakukan skoring terhadap jawaban klien;
- c. Evaluasi hasil WHOQoL-BREF klien;
- d. Pencatatan dan pendokumentasian hasil WHOQoL-BREF.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 68% persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat terealisasi sebanyak 86,67% atau sebesar 126%.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	86,67%	126%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 pada indikator kinerja Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup, mengalami peningkatan capaian pada tahun 2024.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target dalam renstra BNN tahun 2020-2024 yaitu sebesar 65% untuk tahun 2024. Pada dialog kinerja / penyepakatan target kinerja antara satker dan Pembina Fungsi disepakati target sebesar 68% Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup. Target ini lebih tinggi 12.59% dari target yang ada pada Renstra BNN. Capaian target IKK Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup tahun 2024 adalah 86,67% atau lebih tinggi dari capaian Renstra BNN tahun 2020-2024.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi kinerja BNNK Sumbawa tahun 2024 dalam indikator kinerja kegiatan Persentase Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

NO	WILAYAH	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	Nasional	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	85,01
2	Kabupaten Sumbawa				86,67

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja BNNK Sumbawa sebesar 86,67%. Hasil tersebut lebih tinggi dari realisasi kinerja Persentase Penyalahguna dan atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup secara nasional sebesar 85.01%. BNNK Sumbawa akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2025 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari capaian realisasi kinerja secara nasional.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah rencana terapi yang sesuai dengan kebutuhan klien sehingga sebagian besar klien mengalami perubahan hidup kearah yang lebih positif.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah pemahaman klien terkait isi (pertanyaan) dalam instrument seringkali berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a. Sumber Daya Manusia

Ditengah keterbatasan SDM, BNNK Sumbawa berupaya untuk mengoptimalkan kinerja sesuai dengan matrik peran hasil yang telah dibuat atau sesuai dengan ketentuan.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk memudahkan melaksanakan kegiatan pasca rehabilitasi petugas menggunakan BMN berupa laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan tugas.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah petugas rehabilitasi yang memberikan formulir WHOQOL Breef mampu menjelaskan isi pertanyaan kepada klien/penanggung jawab klien untuk memudahkan dalam menjawab isi pertanyaan sehingga hasil persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat valid.

5. Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

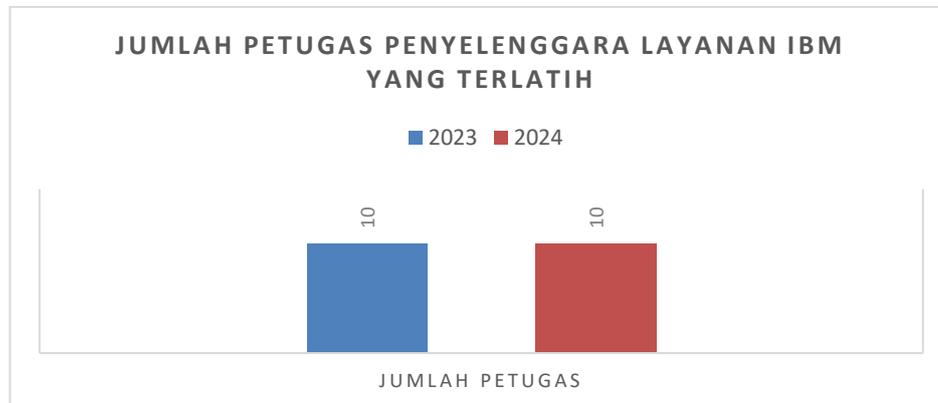
2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 10 orang jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat terealisasi sebanyak 10 Orang atau sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih mengalami jumlah yang tetap yaitu sebanyak 10 orang.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNNK Sumbawa (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tahun 2024 adalah 10 orang atau 100%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih di Kabupaten Sumbawa adalah sebanyak 10 orang dari target 10 orang. Realisasi jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada tingkat nasional adalah kumulatif realisasi dari BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- a. Dukungan dari perangkat desa dalam layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat diwilayahnya;
- b. Ada beberapa desa yang memasukkan anggaran P4GN dalam kegiatan APBDes dalam mendukung program rehabilitasi diwilayahnya;
- c. Koordinasi & kerja sama serta dukungan kepala desa, lurah, dan masyarakat.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Ada beberapa desa yang tidak aktif dalam melaksanakan layanan Rehabilitasi IBM (belum ada klien yang melaporkan diri untuk mengikuti program rehabilitasi);
2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang bahaya narkoba, sehingga perlu usaha lebih untuk menjalankan program IBM;

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a. Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai target persentase jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, seksi rehabilitasi BNNK Sumbawa memaksimalkan SDM yang ada dengan melakukan pembagian tugas secara profesional.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menunjang adalah kendaraan dinas roda 4 serta alat pengolahan data yang masih terbatas. Meskipun demikian seksi rehabilitasi memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai target IKK tahun 2024.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya jika terdapat keluarga atau kerabatnya yang memiliki ketergantungan narkoba;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi setelah melaksanakan pelatihan kepada petugas IBM supaya keterlampiran dalam melaksanakan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat dapat diterapkan dengan baik.

6.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	2 Lembaga	200%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah fasilitas milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi (rawat inap dan/atau rawat jalan) korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba secara mandiri atau dengan mendapat dukungan dari instansi pemerintah dan donor lain.

2. Metode Pengukuran

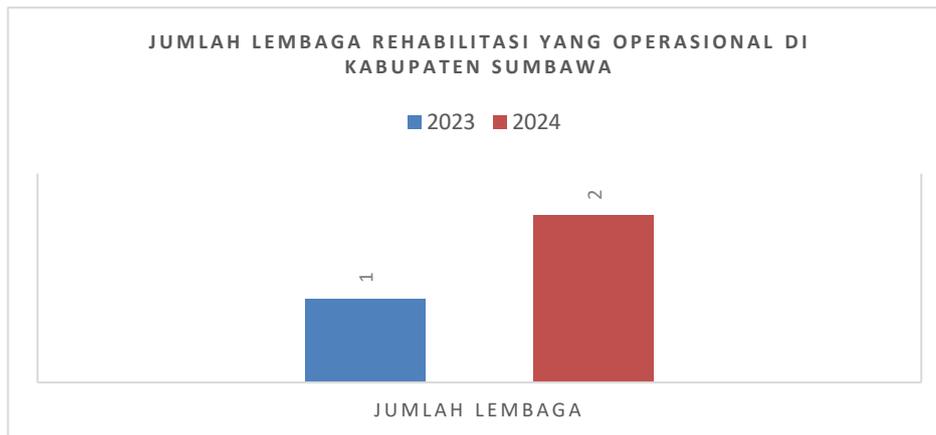
Metode pengukuran jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional di Kabupaten Sumbawa.
- b. Fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 fasilitas lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dapat terealisasi sebanyak 2 fasilitas lembaga atau sebesar 200%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional di kabupaten Sumbawa mengalami kenaikan capaian pada tahun 2024 yaitu dari 1 lembaga pada tahun 2023 menjadi 2 lembaga pada tahun 2024.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNNK Sumbawa (Renproja tahun 2020 - 2024) target jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional di wilayah provinsi tahun 2024 adalah 6 lembaga. Akan tetapi terjadi perubahan target pada dialog kinerja atau penyepakatan kinerja antara satker dan Pembina fungsi diawal tahun 2024 yaitu disepakati 1 lembaga saja dikarenakan faktor anggaran yang terbatas.

Hasil capaian indikator kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional di kabupaten Sumbawa tahun 2024 sebesar 2 lembaga atau 200%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional di kabupaten Sumbawa adalah sebanyak 2 lembaga dari target 1 lembaga. Realisasi jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional pada tingkat nasional adalah kumulatif realisasi dari BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- a. Koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah terkait layanan lembaga rehabilitasi.
- b. Mendorong layanan dengan merujuk klien dari hasil SIL dan atau setelah dilakukan assessment di klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah jarak tempuh lembaga rehabilitasi di kabupaten Sumbawa rata-rata sangat jauh sehingga waktu pelaksanaan pembinaan maupun koordinasi menjadi kurang maksimal.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a. Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai target indikator kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional di kabupaten Sumbawa, seksi rehabilitasi BNNK Sumbawa memaksimalkan SDM yang ada dengan melakukan pembagian tugas secara profesional.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menunjang adalah kendaraan dinas roda 4 serta alat pengolahan data yang masih terbatas. Meskipun demikian seksi rehabilitasi memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai target IKK tahun 2024.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah dengan meningkatkan advokasi, koordinasi, serta pembinaan kepada lembaga rehabilitasi di wilayah kabupaten Sumbawa agar memenuhi standar pelayanan maksimal terkait upaya rehabilitasi kepada pecandu narkoba.

7	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah kabupaten adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Kabupaten dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 2 unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional dapat terealisasi sebesar 2 unit atau sebesar 100%.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional mengalami persamaan capaian pada tahun 2024 yaitu 2 unit IBM.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNNK Sumbawa (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional tahun 2024 adalah 7 unit. Akan tetapi terjadi perubahan target pada dialog kinerja atau penyepakatan kinerja antara satker dan Pembina fungsi di awal tahun 2024 yaitu disepakati 2 unit berdasarkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan rehabilitasi IBM.

Hasil capaian indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional tahun 2024 sebesar 2 unit atau 100%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional adalah sebanyak 2 unit dari target 2 unit atau 100%. Realisasi jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional adalah kumulatif realisasi dari BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya kerjasama yang baik lintas program maupun lintas sektor terutama peran

pemerintah daerah (kelurahan). Sosialisasi tentang pentingnya layanan rehabilitasi IBM sebagai solusi atas kendala sulitnya akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, terutama dimasyarakat dengan kurangnya akses informasi. Faktor selanjutnya adalah adanya antusias masyarakat yang tinggi dalam melaksanakan program P4GN.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. beberapa petugas IBM yang sudah terlatih masih berasumsi bahwa tugasnya dapat mengancam diri dan keluarganya ketika melaksanakan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, ancaman tersebut berasal dari pengedar diwilayahnya;
2. masih kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan Operasional IBM.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terbatas di bidang rehabilitasi sangat terbantu dengan adanya peran aktif dari masyarakat terutama Agen pemulihan yang membantu terlaksananya kegiatan intervensi berbasis masyarakat (IBM).

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data serta kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah petugas layanan rehabilitasi BNNK Sumbawa memberikan pemahaman bahwa dalam melaksanakan proses pemulihan kepada klien merupakan tugas mulia dan memberikan rasa aman dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas IBM. Tetap menjalin komunikasi

antara petugas, perangkat Desa, AP dan klien dan tetap melaksanakan monitoring terhadap unit IBM yang sudah terbentuk.

8. Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika.

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi BNN	3,29	3,90	118%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

2. Metode Pengukuran

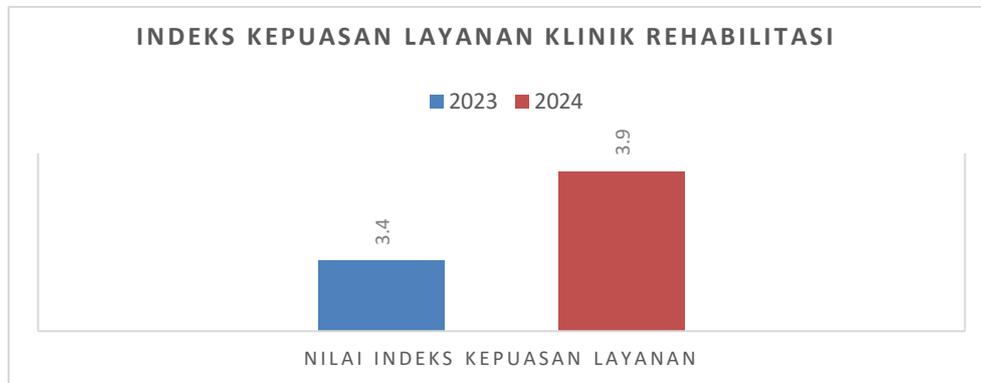
Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3,29 untuk nilai indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN dapat terealisasi sebesar 3.90 atau sebesar 118%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi BNN	3,29	3,90	118%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi BNN mengalami kenaikan capaian pada tahun 2024 yaitu dari nilai 3.40 pada tahun 2023 menjadi 3.90 pada tahun 2024.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi BNN dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNNK Sumbawa (Renproja tahun 2020 - 2024) untuk tahun 2024 adalah 3.35 indeks. Target yang disepakati dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu 3.29 indeks.

Capaian indeks kepuasan layanan rehabilitasi di klinik BNNK Sumbawa berdasarkan hasil survey adalah 3.90 indeks atau 118%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi kinerja BNNK Sumbawa tahun 2024 dalam indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

NO	WILAYAH	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	Nasional	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi BNN	3,29	3,62
2	Kabupaten Sumbawa				3,90

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja BNNK Sumbawa sebesar 3.90 indeks. Hasil tersebut lebih tinggi dari realisasi Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi BNN secara nasional sebesar 3.62 indeks. BNNK Sumbawa akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2025 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari capaian realisasi kinerja secara nasional.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya semangat kerja yang tinggi dari para personil dan kerjasama tim yang solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah Organisasi lembaga swadaya masyarakat sebagian besar hanya bergerak pada ranah preventif saja atau upaya-upaya pencegahan, kampanye anti Narkoba dsb masih sedikit yang ke arah rehabilitasi.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a. Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai kinerja meningkatnya indeks kepuasan Layanan klinik rehabilitasi, BNNK Sumbawa memaksimalkan SDM yang ada. Dengan keterbatasan SDM koordinator berupaya untuk tetap memperhatikan mutu pelayanan yang ada di Klinik Pratama dengan melakukan pengaturan jadwal jaga diklinik dan memotivasi pegawai agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada penerima layanan (klien, keluarga klien dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi). Petugas Rehabilitasi pada Klinik Pratama BNNK Sumbawa setiap tahunnya menerima peningkatan kemampuan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNN RI baik secara luring maupun daring guna meningkatkan mutu layanan kepada klien.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah obat-obatan penunjang klien, alat medis dan formulir layanan rehabilitasi yang telah dipersiapkan.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah melakukan upaya sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait dalam upaya memberikan layanan Rehabilitasi gratis dan sosialisasi terkait pentingnya Lembaga Rehabilitasi berbasis Masyarakat.

9.	Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kinerja anggaran	87	99,5	114%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNN adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 87 untuk nilai kinerja anggaran BNNK Sumbawa dapat terealisasi sebesar 99.50 atau sebesar 114%.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	418324	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA	100,00	98,99	99,50

- data diambil dari aplikasi SMART Kemenkeu

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara Nilai Kinerja Anggaran BNN pada BNNK Sumbawa mengalami kenaikan capaian pada tahun 2024.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah Renstra BNN RI tahun 2020-2024 ditargetkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 90 indeks. Berdasarkan hasil dialog kinerja tahun 2024 antara BNNK Sumbawa dan Pembina Fungsi target Nilai Kinerja Anggaran BNNK Sumbawa adalah 87 indeks (berdasarkan hasil realisasi NKA BNNK Sumbawa tahun 2023 sebesar 86,05 indeks). Hasil capaian realisasi tahun 2024 adalah 99.50 atau 114%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Perbandingan realisasi kinerja indikator nilai kinerja anggaran BNN pada BNNK Sumbawa dengan tingkat nasional masih menunggu data dari Biro Perencanaan BNN RI.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNK Sumbawa telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2024.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Secara keseluruhan capaian per indikator penilaian NKA satker sudah dapat dilaksanakan secara baik terbukti dengan capaian nilai NKA yang mencapai 99.50 indeks. Beberapa permasalahan yang ada yaitu kurang maksimalnya capaian output Layanan SKHPN karena menurunnya jumlah klien yang disebabkan biaya PNBPN terhadap Layanan SKHPN dirasakan Sebagian Masyarakat masih mahal dibandingkan dengan di tempat lain.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a. Sumber daya manusia.

SDM yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja terdiri dari 1 orang PNS, 1 orang PPPK, dan 2 orang PPNPN di bagian umum.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolahan data.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.

Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,41	98,99	101%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu : Pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berpedoman Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran IKPA Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Penyerapan Anggaran
- d. Belanja Kontraktual
- e. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%),
- f. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan
- g. Dispensasi SPM
- h. Capaian Output

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

$$\text{Nilai IKPA} = \frac{\sum (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n)}{\text{Konversi Bobot } (n-1)}$$

Keterangan:

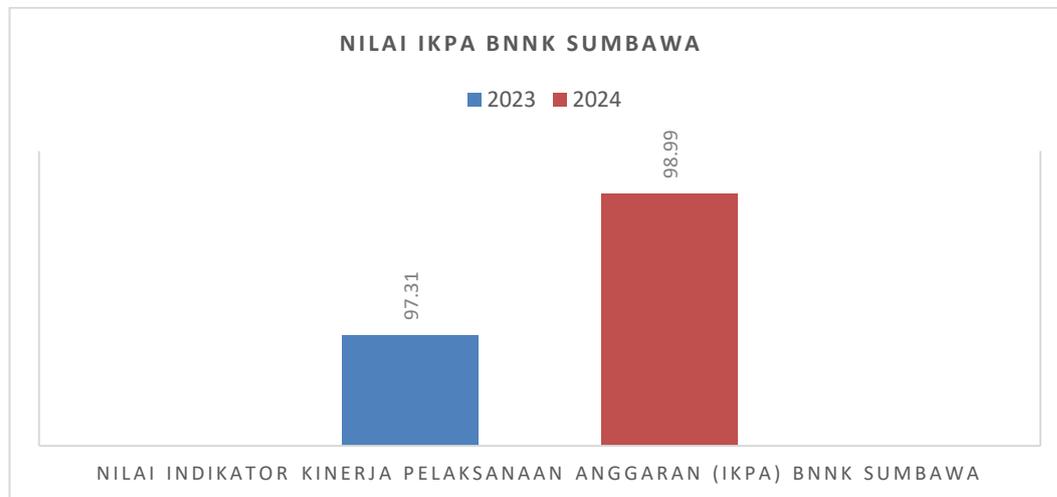
- Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 97.41 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNNK Sumbawa dapat terealisasi sebesar 98,99 atau sebesar 101%.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	101	066	418324	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA	Nilai	100.00	94.59	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	79.19	80%	0.00	98.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.30		100.00				100.00				

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK Sumbawa, mengalami kenaikan capaian pada tahun 2024.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNNK Sumbawa (Renproja tahun 2020 - 2024) target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK Sumbawa tahun 2024 adalah 97. Berdasarkan hasil dialog kinerja tahun 2024 antara BNNK Sumbawa dan Pembina Fungsi target Nilai IKPA BNNK Sumbawa adalah 97.41 indeks. Adapun realisasi capaian nilai IKPA tahun 2024 adalah 98,99 atau 101%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Perbandingan realisasi kinerja indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan tingkat nasional masih menunggu data dari Biro Keuangan BNN RI.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNK Sumbawa telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2024.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Secara keseluruhan capaian per indikator penilaian IKPA satker sudah dapat dilaksanakan secara baik terbukti dengan capaian nilai IKPA yang mencapai 98,99 indeks. Beberapa permasalahan yang ada yaitu kurang maksimalnya capaian output Layanan SKHPN karena menurunnya jumlah klien yang disebabkan biaya PNBPN terhadap Layanan SKHPN dirasakan sebagian masyarakat masih mahal dibandingkan dengan di tempat lain.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a. Sumber daya manusia.

SDM yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja terdiri dari 1 orang PNS, 1 orang PPPK, dan 2 orang PPNPN di bagian umum.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2024 BNNK Sumbawa mendapat hibah sebesar Rp. 262.816.000 dan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.608.888.000 dengan total anggaran Rp. **1.871.704.000,-** (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Program Dukungan dan Tugas Manajemen Pelaksanaan Lainnya BNN	1.270.925.000	1.264.711.798	99,5	6.213.202	0,49
2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	600.779.000	597.406.667	99,4	3.372.333	0,56
TOTAL		1.871.704.000	1.862.118.465	99,49	9.585.535	0,51

Adapun rincian realisasi anggaran BNN Kabupaten Sumbawa pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BNNK SUMBAWA TA. 2024 S/D 31 DESEMBER 2024									
Kode Bagian	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN				OUTPUT			
		PAGU	REALISASI	%	SISA	TARGET	REALISASI	%	SATUAN
BAGIAN UMUM		1,270,925,000	1,264,711,798	99.51	6,213,202	51	51	100.00	
3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	41,280,000	41,280,000	100.00	-	12	12	100	Layanan
3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	6,960,000	6,960,000	100.00	-	2	2	100	Dokumen
3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	11,040,000	11,038,650	99.99	1,350	1	1	100	Layanan
3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10,490,000	10,490,000	100.00	-	2	2	100	Dokumen
3238.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19,362,000	19,304,000	99.70	58,000	2	2	100	Dokumen
3239.EBA.962	Layanan Umum	131,952,000	131,772,735	99.86	179,265	1	1	100	Layanan
3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	985,935,000	979,960,413	99.39	5,974,587	12	12	100	Layanan
3939.EBB.951	Layanan Sarana Internal	53,906,000	53,906,000	100.00	-	18	18	100	Unit
3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	10,000,000	10,000,000	100.00	-	1	1	100	Layanan
SEKSI P2M		362,835,000	362,657,800	99.95	177,200	19	19	100.00	
3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40,000,000	39,924,000	99.81	76,000	5	5	100	Keluarga
3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	66,000,000	65,973,400	99.96	26,600	2	2	100	Desa
3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	191,835,000	191,760,400	99.96	74,600	2	2	100	Lembaga
5936.QDC.001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	65,000,000	65,000,000	100.00	-	10	10	100	Orang
SEKSI REHABILITASI		205,819,000	202,623,867	98.45	3,195,133	449	510	807	
3256.BAA.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	5,945,000	5,891,000	99.09	54,000	10	10	100	Orang
3259.PDG.001	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis	14,665,000	14,665,000	100.00	-	10	10	100	Orang
3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	34,144,000	33,929,867	99.37	214,133	25	76	304	Orang
3260.BAA.003	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	92,800,000	92,800,000	100.00	-	400	410	103	Orang
3260.BDB.001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	4,760,000	4,760,000	100.00	-	2	2	100	Lembaga
3260.QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	53,505,000	50,578,000	94.53	2,927,000	2	2	100	Lembaga
SEKSI PEMBERANTASAN		32,125,000	32,125,000	100	-	33	33	100	
3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	32,125,000	32,125,000	100.00	-	33	33	100	Orang
TOTAL SELURUHNYA		1,871,704,000	1,862,118,465	99.49	9,585,535	552	613	111.05	

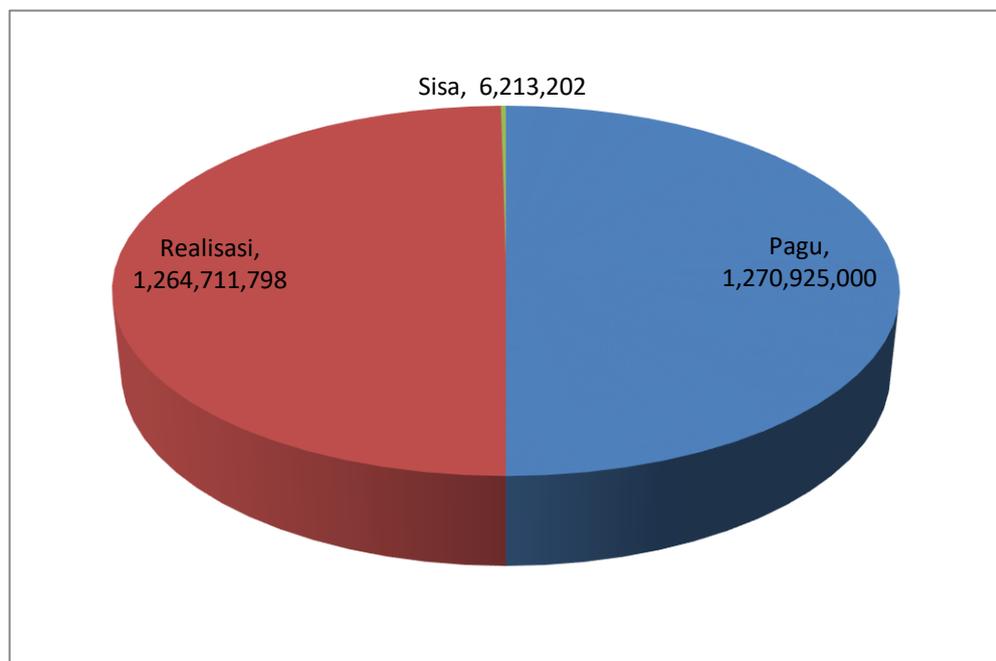
Anggaran BNNK Sumbawa beserta BNNK jajarannya Tahun 2024 dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN, dengan pagu sebesar Rp 1.270.925.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 1.270.925.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.264.711.798,- (99.5%), sisa anggaran sebesar Rp. 6.213.202,- (0,49%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat dari adanya pemblokiran anggaran akun perjalanan dinas, pembayaran tagihan langganan air, listrik dan telpon tidak terserap maksimal karena tagihan bulanan tidak bisa diprediksi serta pajak kendaraan bermotor tidak terserap maksimal karena dianggarkan melebihi jumlah pajak yang dibayarkan.

Grafik 1. Realiasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya

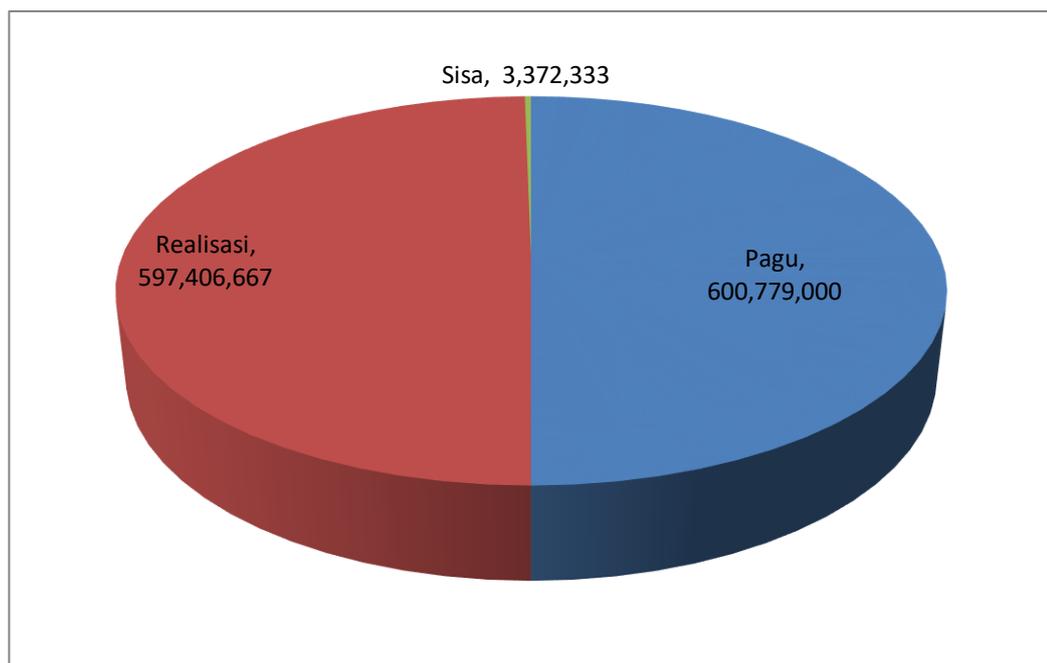


2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan pagu sebesar Rp. 600.779.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 600.779.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 597.406.667,- (99,4%), sisa anggaran sebesar Rp. 3.372.333,- (0,56%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat disebabkan adanya sisa dari kegiatan Rehabilitasi yang tidak terserap sepenuhnya.

Grafik 2. Realiasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BNNK Sumbawa Tahun 2024, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNK Sumbawa sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNK Sumbawa telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 2 (dua) pilar BNNK Sumbawa yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNK Sumbawa dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNNK Sumbawa beserta BNNK diजारannya pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan, ada 10 sasaran dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNNK Sumbawa.

B. Pengukuran Kinerja Outcome

Gambaran pencapaian IKK BNNK Sumbawa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Urutan	Jumlah IKK	Rentang Capaian	%
I.	7	Capaian $\geq 100\%$	70%
II.	3	$85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$	30%
III.	0	$70\% \leq \text{Capaian} < 85\%$	0%
IV.	0	Capaian $< 70\%$	0%
V.	0	NA (<i>Not Available</i>)	0%

C. Pengukuran Kinerja Anggaran

Pencapaian kinerja anggaran BNNK Sumbawa tahun anggaran 2024 setelah dilakukan rekonsiliasi dan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 214/PMK.02/2017 adalah sebesar 98,99 dengan kriteria “Sangat Baik”.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	418324	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA	100,00	98,99	99,50
Rentang Capaian			Kategori		
Capaian \geq 100%			Memuaskan		
$85\% \leq$ Capaian $<$ 100%			Sangat Baik		
$70\% \leq$ Capaian $<$ 85%			Baik		
$55\% \leq$ Capaian $<$ 70%			Cukup		
$55\% \leq$ Capaian			Kurang		

D. Langkah yang Akan Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja

- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- Meningkatkan kualitas SDM pegawai baik di BNNP maupun BNNK melalui pelatihan-pelatihan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
- Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang sudah ada mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (BNN Kendali, Sistem Informasi Narkotika, SIRENA BNN dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (*e-monev* dan *e-lkip*) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

Lampiran :



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DENNY PRIADI, S.Sos.
Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN SUMBAWA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : GAGAS NUGRAHA, S.H., S.I.K., M.M., M.H.
Jabatan : KEPALA BNNP NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 29 Februari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

GAGAS NUGRAHA, S.H., S.I.K., M.M., M.H.

Pihak Pertama,
**KEPALA DAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

DENNY PRIADI, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	83,125 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,49 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,29 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,41 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	65.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.	216.570.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	14.665.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	153.709.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	6.545.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	96.530.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	11.040.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	20.278.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.	996.595.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	10.000.000

Mataram, 29 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

GAGAS NUGRAHA, S.H., S.I.K., M.M., M.H.

DENNY PRIADI, S.Sos.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman
Narkoba Tahun 2024.

Jakarta, 23 November 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

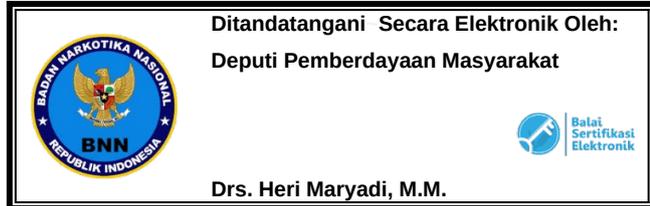
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN_NARKOBA TAHUN 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aceh	2.82	3.54	2.82	2.97	2.99	3.06	Tanggap	B
2.	Gayo Lues	3.48	3.63	3.23	3.35	3.47	3.46	Sangat Tanggap	A
3.	Aceh Selatan	2.99	3.66	3.19	3.47	3.53	3.38	Sangat Tanggap	A
4.	Pidie	2.88	3.59	3.27	3.19	2.91	3.18	Tanggap	B
5.	Pidie Jaya	2.93	3.54	2.65	2.73	2.60	2.96	Tanggap	B
6.	Aceh Tamiang	2.37	3.41	2.48	2.69	2.68	2.76	Tanggap	B
7.	Bireuen	2.71	3.47	2.66	2.90	2.93	2.98	Tanggap	B
8.	Kota Sabang	2.62	3.42	2.44	2.87	3.35	2.98	Tanggap	B
9.	Kota Lhokseumawe	2.55	3.49	2.62	2.90	2.78	2.91	Tanggap	B
10.	Kota Langsa	3.19	3.84	3.22	3.55	3.64	3.51	Sangat Tanggap	A
11.	Banda Aceh	2.83	3.55	2.70	2.85	2.89	3.01	Tanggap	B
12.	Sumatera Utara	2.94	3.51	2.90	3.07	3.06	3.13	Tanggap	B
13.	Mandailing Natal	2.70	3.44	2.54	2.70	2.65	2.86	Tanggap	B
14.	Deli Serdang	3.20	3.57	2.94	3.17	3.13	3.25	Tanggap	B
15.	Simalungun	2.78	3.50	2.79	3.20	3.42	3.16	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Serdang Bedagai	2.75	3.52	3.04	3.35	3.21	3.19	Tanggap	B
17.	Kota Pematang Siantar	2.46	3.32	2.35	2.52	2.52	2.69	Tanggap	B
18.	Kota Asahan	2.71	3.32	2.64	2.75	2.67	2.86	Tanggap	B
19.	Kota Tebing Tinggi	3.28	3.52	2.88	2.89	2.99	3.16	Tanggap	B
20.	Kota Tanjungbalai	3.19	3.74	2.96	3.59	3.60	3.46	Sangat Tanggap	A
21.	Tapanuli Selatan	2.94	3.41	3.33	3.24	3.19	3.21	Tanggap	B
22.	Kota Binjai	2.82	3.34	2.68	2.93	2.96	2.99	Tanggap	B
23.	Langkat	2.91	3.62	3.01	3.09	3.00	3.15	Tanggap	B
24.	Kota Gunung Sitoli	3.03	3.43	3.00	3.17	3.28	3.20	Tanggap	B
25.	Labuhan Batu Utara	3.53	3.60	3.18	3.33	3.44	3.45	Sangat Tanggap	A
26.	Karo	2.67	3.35	2.54	2.81	2.90	2.89	Tanggap	B
27.	Batu Bara	2.91	3.91	3.59	3.75	3.47	3.52	Sangat Tanggap	A
28.	Sumatera Barat	3.18	3.55	2.94	3.20	3.33	3.28	Sangat Tanggap	A
29.	Kota Payakumbuh	2.61	3.29	2.65	3.05	3.20	2.98	Tanggap	B
30.	Kota Sawahlunto	2.98	3.46	2.60	2.90	2.91	3.03	Tanggap	B
31.	Pasaman Barat	3.55	3.72	3.52	3.69	3.59	3.63	Sangat Tanggap	A
32.	Solok	3.66	3.73	2.96	3.16	3.63	3.48	Sangat Tanggap	A
33.	Sumatera Selatan	2.94	3.55	2.84	3.17	3.29	3.19	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Kota Pagar Alam	2.84	3.56	2.67	3.04	3.28	3.12	Tanggap	B
35.	Kota Lubuklinggau	2.69	3.21	2.45	2.72	3.26	2.89	Tanggap	B
36.	Prabumulih	3.71	3.88	3.37	3.60	3.45	3.65	Sangat Tanggap	A
37.	Ogan Ilir	2.26	3.49	2.55	3.18	3.67	3.04	Tanggap	B
38.	Ogan Komering Ilir	3.50	3.68	2.79	3.34	3.39	3.42	Sangat Tanggap	A
39.	Empat Lawang	3.21	3.36	3.25	3.34	3.28	3.29	Sangat Tanggap	A
40.	Muara Enim	3.00	3.66	3.01	3.04	3.13	3.19	Tanggap	B
41.	Musi Rawas	2.54	3.25	2.45	2.85	2.99	2.85	Tanggap	B
42.	Ogan Komering Ulu Timur	2.64	3.59	2.74	3.18	3.23	3.11	Tanggap	B
43.	Bengkulu	2.64	3.38	2.35	2.68	2.62	2.80	Tanggap	B
44.	Bengkulu Selatan	2.61	3.47	2.33	2.70	2.62	2.82	Tanggap	B
45.	Kota Bengkulu	2.66	3.29	2.38	2.65	2.62	2.78	Tanggap	B
46.	Jambi	2.67	3.51	2.70	3.01	2.97	3.01	Tanggap	B
47.	Batang Hari	2.76	3.60	2.96	3.26	3.19	3.18	Tanggap	B
48.	Tanjung Jabung Timur	2.60	3.46	2.64	2.84	2.78	2.91	Tanggap	B
49.	Kota Jambi	2.64	3.47	2.44	2.95	2.99	2.96	Tanggap	B
50.	Riau	2.92	3.57	2.90	3.09	3.38	3.19	Tanggap	B
51.	Kota Dumai	2.63	3.38	2.57	2.70	3.18	2.91	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Kota Pekanbaru	3.05	3.62	2.59	3.53	3.72	3.37	Sangat Tanggap	A
53.	Pelalawan	3.78	3.89	3.71	3.69	3.81	3.79	Sangat Tanggap	A
54.	Kuantan Singingi	2.44	3.47	2.79	2.69	3.00	2.88	Tanggap	B
55.	Kepulauan Riau	3.00	3.69	3.01	3.31	3.52	3.33	Sangat Tanggap	A
56.	Karimun	2.97	3.83	3.29	3.30	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
57.	Kota Batam	3.32	3.88	3.22	3.81	3.77	3.64	Sangat Tanggap	A
58.	Tanjung Pinang	2.79	3.38	2.58	2.84	3.29	3.00	Tanggap	B
59.	Bangka Belitung	2.96	3.54	2.96	3.20	3.23	3.21	Tanggap	B
60.	Bangka Selatan	3.15	3.54	2.82	3.01	3.15	3.18	Tanggap	B
61.	Bangka	3.16	3.59	3.39	3.43	3.47	3.40	Sangat Tanggap	A
62.	Kota Pangkalpinang	2.80	3.50	2.73	3.16	3.21	3.12	Tanggap	B
63.	Belitung	2.72	3.53	2.82	3.17	2.97	3.08	Tanggap	B
64.	Lampung	2.88	3.55	2.60	3.01	3.02	3.07	Tanggap	B
65.	Tanggamus	2.52	3.46	2.51	2.92	2.82	2.90	Tanggap	B
66.	Lampung Selatan	3.42	3.85	3.07	3.66	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
67.	Kota Metro	2.76	3.42	2.55	2.92	3.03	2.98	Tanggap	B
68.	Way Kanan	2.95	3.61	2.92	3.28	3.30	3.25	Tanggap	B
69.	Lampung Timur	2.78	3.48	2.23	2.60	2.60	2.83	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	Banten	3.21	3.69	3.07	3.48	3.51	3.43	Sangat Tanggap	A
71.	Kota Tangerang Selatan	3.41	3.84	3.54	3.82	3.86	3.70	Sangat Tanggap	A
72.	Kota Cilegon	2.50	3.66	3.15	3.49	3.49	3.25	Sangat Tanggap	A
73.	Kota Tangerang	3.50	3.63	2.74	3.19	3.25	3.34	Sangat Tanggap	A
74.	DKI Jakarta	2.91	3.56	2.64	2.80	2.70	2.99	Tanggap	B
75.	Kota Jakarta Timur	2.68	3.58	2.49	2.64	2.46	2.84	Tanggap	B
76.	Kota Jakarta Selatan	3.31	3.59	2.88	2.79	2.79	3.13	Tanggap	B
77.	Kota Jakarta Utara	2.63	3.51	2.55	2.97	2.91	2.97	Tanggap	B
78.	Jawa Barat	2.76	3.51	2.58	2.91	2.89	2.99	Tanggap	B
79.	Karawang	2.72	3.46	2.27	2.48	2.51	2.77	Tanggap	B
80.	Sukabumi	2.69	3.35	2.35	2.60	2.58	2.78	Tanggap	B
81.	Bogor	2.62	3.30	2.38	2.80	2.69	2.82	Tanggap	B
82.	Sumedang	2.66	3.38	2.32	2.64	2.70	2.81	Tanggap	B
83.	Tasikmalaya	2.53	3.44	2.28	2.71	2.96	2.84	Tanggap	B
84.	Ciamis	2.70	3.39	2.20	2.66	2.58	2.79	Tanggap	B
85.	Kuningan	2.46	3.14	2.34	3.09	3.15	2.88	Tanggap	B
86.	Kota Cirebon	2.47	3.33	2.41	2.57	2.40	2.69	Tanggap	B
87.	Kota Depok	3.32	3.80	3.10	3.35	3.52	3.46	Sangat Tanggap	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	Cianjur	3.20	3.92	2.79	3.17	2.74	3.26	Sangat Tanggap	A
89.	Garut	3.00	3.82	3.21	3.68	3.83	3.52	Sangat Tanggap	A
90.	Kota Bandung	3.29	3.72	2.97	3.29	3.27	3.36	Sangat Tanggap	A
91.	Kota Cimahi	2.80	3.87	3.33	3.73	3.88	3.52	Sangat Tanggap	A
92.	Bandung Barat	2.73	3.43	2.35	2.66	2.63	2.83	Tanggap	B
93.	DI Yogyakarta	2.97	3.62	2.94	3.35	3.29	3.27	Sangat Tanggap	A
94.	Kota Yogyakarta	3.22	3.63	2.87	3.46	3.24	3.35	Sangat Tanggap	A
95.	Bantul	3.28	3.94	3.63	3.84	3.88	3.71	Sangat Tanggap	A
96.	Sleman	2.49	3.21	2.12	2.52	2.47	2.64	Cukup Tanggap	C
97.	Jawa Tengah	3.13	3.64	2.90	3.39	3.26	3.32	Sangat Tanggap	A
98.	Kendal	3.01	3.67	2.94	3.21	3.10	3.23	Tanggap	B
99.	Temanggung	3.19	3.67	3.23	3.54	3.14	3.40	Sangat Tanggap	A
100.	Banyumas	2.50	3.86	3.18	3.67	2.55	3.21	Tanggap	B
101.	Purbalingga	2.68	3.49	2.36	2.80	2.74	2.89	Tanggap	B
102.	Batang	3.17	3.15	2.71	3.40	3.67	3.25	Sangat Tanggap	A
103.	Cilacap	3.90	3.89	3.02	3.57	3.67	3.69	Sangat Tanggap	A
104.	Magelang	3.14	3.66	3.00	3.72	3.76	3.49	Sangat Tanggap	A
105.	Kota Surakarta	2.96	3.46	2.45	2.94	2.99	3.03	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	Kota Tegal	3.66	3.91	3.40	3.87	3.86	3.78	Sangat Tanggap	A
107.	Jawa Timur	2.98	3.66	2.87	3.42	3.41	3.31	Sangat Tanggap	A
108.	Malang	3.07	3.80	3.11	3.62	3.54	3.46	Sangat Tanggap	A
109.	Tulungagung	3.28	3.72	3.05	3.46	3.65	3.47	Sangat Tanggap	A
110.	Pasuruan	3.42	3.93	3.20	3.81	3.99	3.71	Sangat Tanggap	A
111.	Sumenep	3.34	3.71	3.46	3.76	3.86	3.63	Sangat Tanggap	A
112.	Gresik	2.99	3.62	3.27	3.76	3.75	3.48	Sangat Tanggap	A
113.	Lumajang	3.25	3.86	3.20	3.41	3.54	3.48	Sangat Tanggap	A
114.	Kediri	2.69	3.48	2.26	3.11	2.99	2.99	Tanggap	B
115.	Tuban	2.72	3.51	2.27	2.85	2.93	2.94	Tanggap	B
116.	Kota Malang	2.56	3.29	2.44	2.96	2.70	2.85	Tanggap	B
117.	Kota Surabaya	3.06	3.65	2.88	3.35	3.51	3.33	Sangat Tanggap	A
118.	Kota Kediri	3.15	3.75	3.04	3.57	3.64	3.47	Sangat Tanggap	A
119.	Sidoarjo	2.53	3.82	2.67	3.55	3.38	3.25	Sangat Tanggap	A
120.	Kota Batu	2.47	3.30	2.41	3.07	3.03	2.91	Tanggap	B
121.	Trenggalek	3.28	3.88	3.30	3.80	3.75	3.63	Sangat Tanggap	A
122.	Nganjuk	2.62	3.66	2.69	3.59	3.62	3.28	Sangat Tanggap	A
123.	Kota Mojokerto	2.72	3.38	2.51	3.06	2.93	2.98	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124.	Blitar	3.80	3.89	3.34	3.71	3.40	3.69	Sangat Tanggap	A
125.	Bali	2.90	3.52	2.63	2.94	2.89	3.04	Tanggap	B
126.	Badung	3.15	3.58	2.88	3.33	3.25	3.29	Sangat Tanggap	A
127.	Gianyar	2.69	3.53	2.38	2.67	2.52	2.84	Tanggap	B
128.	Klungkung	2.63	3.28	2.28	2.75	2.75	2.80	Tanggap	B
129.	Buleleng	3.64	3.78	3.52	3.75	3.89	3.73	Sangat Tanggap	A
130.	Karangasem	2.62	3.44	2.65	3.16	3.06	3.03	Tanggap	B
131.	Kota Denpasar	2.78	3.44	2.36	2.71	2.91	2.90	Tanggap	B
132.	Nusa Tenggara Timur	2.69	3.33	2.28	2.55	2.37	2.73	Tanggap	B
133.	Kota Kupang	2.74	3.41	2.21	2.65	2.48	2.79	Tanggap	B
134.	Belu	2.65	3.25	2.35	2.62	2.36	2.72	Tanggap	B
135.	Rote Ndao	2.67	3.32	2.30	2.40	2.26	2.67	Tanggap	B
136.	Nusa Tenggara Barat	2.96	3.58	2.93	3.16	3.17	3.19	Tanggap	B
137.	Sumbawa Barat	2.67	3.52	2.78	2.92	2.82	2.98	Tanggap	B
138.	Bima	2.97	3.55	2.99	3.14	3.09	3.18	Tanggap	B
139.	Mataram	3.89	3.91	3.31	3.81	3.91	3.82	Sangat Tanggap	A
140.	Sumbawa	2.47	3.36	2.66	2.83	2.92	2.87	Tanggap	B
141.	Kalimantan Selatan	2.96	3.51	2.91	3.21	3.21	3.19	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	Barito Kuala	2.99	3.82	3.41	3.77	3.65	3.53	Sangat Tanggap	A
143.	Kota Banjarbaru	2.82	3.64	3.10	3.09	3.01	3.15	Tanggap	B
144.	Balangan	3.48	3.26	2.91	3.23	3.47	3.30	Sangat Tanggap	A
145.	Tanah Laut	3.11	3.59	3.06	3.49	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
146.	Tabalong	2.64	3.27	2.46	2.83	2.67	2.83	Tanggap	B
147.	Hulu Sungai Selatan	2.69	3.48	2.59	3.03	2.98	3.01	Tanggap	B
148.	Hulu Sungai Utara	3.48	3.45	3.25	3.52	3.83	3.51	Sangat Tanggap	A
149.	Kota Banjarmasin	2.73	3.53	2.59	3.00	2.94	3.02	Tanggap	B
150.	Kalimantan Barat	2.85	3.46	2.68	3.04	3.00	3.06	Tanggap	B
151.	Bengkayang	2.48	3.30	2.56	3.16	3.20	2.97	Tanggap	B
152.	Kubu Raya	3.32	3.70	3.11	3.65	3.61	3.52	Sangat Tanggap	A
153.	Sintang	3.21	3.52	2.75	3.00	2.67	3.11	Tanggap	B
154.	Sanggau	2.69	3.41	2.50	2.70	2.69	2.85	Tanggap	B
155.	Kota Singkawang	2.93	3.45	2.67	2.78	2.66	2.96	Tanggap	B
156.	Kota Pontianak	2.65	3.51	2.73	3.20	3.32	3.11	Tanggap	B
157.	Mempawah	2.74	3.43	2.49	2.92	2.95	2.96	Tanggap	B
158.	Kalimantan Timur	2.60	3.42	2.69	2.95	2.79	2.93	Tanggap	B
159.	Samarinda	2.68	3.54	2.79	3.28	3.17	3.13	Tanggap	B

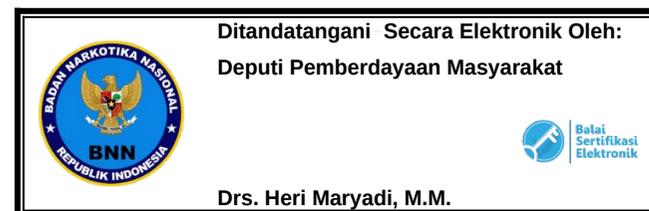
No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	Balikpapan	2.77	3.42	2.70	3.15	2.93	3.04	Tanggap	B
161.	Bontang	2.46	3.36	2.60	2.66	2.50	2.76	Tanggap	B
162.	Kalimantan Tengah	2.89	3.46	2.87	3.43	3.48	3.25	Sangat Tanggap	A
163.	Kota Waringin Barat	3.98	3.93	3.63	3.88	3.98	3.91	Sangat Tanggap	A
164.	Kota Palangka Raya	2.32	3.10	2.32	2.98	2.99	2.78	Tanggap	B
165.	Kalimantan Utara	2.63	3.32	2.61	2.72	2.80	2.85	Tanggap	B
166.	Kota Tarakan	2.65	3.21	2.56	2.86	2.88	2.87	Tanggap	B
167.	Nunukan	2.60	3.47	2.67	2.60	2.73	2.84	Tanggap	B
168.	Sulawesi Selatan	2.94	3.66	3.08	3.46	3.55	3.36	Sangat Tanggap	A
169.	Tana Toraja	2.70	3.54	2.74	3.30	3.42	3.17	Tanggap	B
170.	Bone	2.82	3.95	3.43	3.71	3.79	3.53	Sangat Tanggap	A
171.	Kota Palopo	3.29	3.48	3.05	3.35	3.44	3.35	Sangat Tanggap	A
172.	Sulawesi Tengah	2.66	3.39	2.66	2.78	2.77	2.89	Tanggap	B
173.	Banggai Kepulauan	3.05	3.55	2.89	3.09	3.14	3.18	Tanggap	B
174.	Poso	2.81	3.48	2.72	2.85	3.03	3.01	Tanggap	B
175.	Tojo Una-Una	2.63	3.42	2.63	2.73	2.59	2.85	Tanggap	B
176.	Kota Palu	2.34	3.24	2.41	2.88	2.67	2.75	Tanggap	B
177.	Morowali	2.62	3.34	2.66	2.50	2.54	2.76	Tanggap	B

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178.	Donggala	2.58	3.39	2.67	3.23	3.08	3.03	Tanggap	B
179.	Sulawesi Tenggara	2.68	3.48	2.64	3.10	3.10	3.04	Tanggap	B
180.	Muna	2.47	3.08	2.16	2.46	2.51	2.59	Cukup Tanggap	C
181.	Kolaka	2.44	3.38	2.64	3.01	2.91	2.91	Tanggap	B
182.	Kota Kendari	2.82	3.58	2.66	3.24	3.26	3.17	Tanggap	B
183.	Kota Bau-Bau	3.10	3.77	2.93	3.44	3.46	3.39	Sangat Tanggap	A
184.	Gorontalo	2.84	3.52	2.75	2.97	2.90	3.04	Tanggap	B
185.	Boalemo	2.70	3.42	2.68	2.89	2.70	2.92	Tanggap	B
186.	Bone Bolango	2.56	3.46	2.44	2.59	2.66	2.80	Tanggap	B
187.	Kota Gorontalo	2.73	3.48	2.72	2.90	2.79	2.97	Tanggap	B
188.	Gorontalo Utara	3.35	3.83	3.21	3.72	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
189.	Gorontalo	2.79	3.41	2.62	2.90	2.80	2.96	Tanggap	B
190.	Maluku	3.31	3.67	3.08	3.34	3.17	3.36	Sangat Tanggap	A
191.	Buru Selatan	2.81	3.43	2.65	2.80	2.63	2.92	Tanggap	B
192.	Kota Tual	3.85	3.92	3.48	3.84	3.68	3.80	Sangat Tanggap	A
193.	Maluku Utara	2.74	3.46	2.76	2.65	2.56	2.87	Tanggap	B
194.	Pulau Morotai	2.98	3.24	2.35	2.32	2.02	2.67	Tanggap	B
195.	Halmahera Utara	2.66	3.54	2.99	3.28	3.44	3.19	Tanggap	B
196.	Kota Tidore	2.72	3.49	2.75	2.45	2.33	2.79	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel				Indeks	Kategori	Mutu	
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan				Hukum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepulauan								
197.	Papua	2.74	3.35	2.72	2.97	3.14	3.01	Tanggap	B
198.	Jayapura	3.11	3.46	2.89	3.12	3.22	3.20	Tanggap	B
199.	Mimika	2.25	3.21	2.49	2.79	3.05	2.77	Tanggap	B
200.	Sulawesi Barat	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
201.	Poliwali Mandar	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
202.	Sulawesi Utara	2.62	3.52	2.75	2.82	2.67	2.91	Tanggap	B
203.	Kepulauan Sangihe	2.80	3.99	3.62	3.80	3.28	3.50	Sangat Tanggap	A
204.	Bolaang Mongondow	2.77	3.51	2.64	2.55	2.47	2.84	Tanggap	B
205.	Kota Bitung	2.61	3.37	2.45	2.59	2.62	2.78	Tanggap	B
206.	Kota Manado	2.34	3.26	2.38	2.47	2.41	2.62	Cukup Tanggap	C
207.	Papua Barat	2.43	3.17	2.35	2.47	2.43	2.62	Cukup Tanggap	C
Rata-rata Nasional		2.88	3.53	2.78	3.07	3.06	3.11	Tanggap	B

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penganjur P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

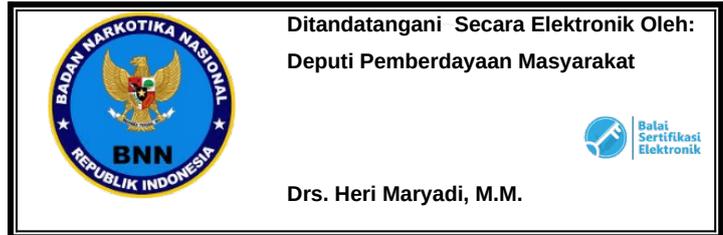
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK T.J. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAH	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANYAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pemberdayaan Masyarakat
	Drs. Heri Maryadi, M.M.

 Balai Sertifikasi Elektronik



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

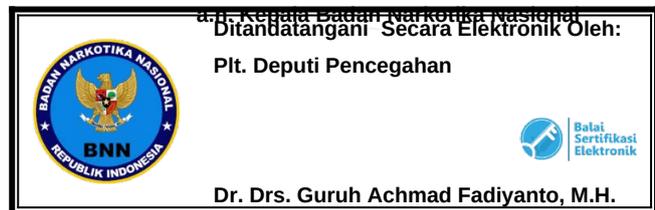
- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAkan	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

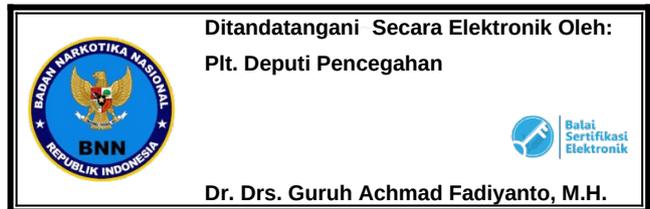
LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

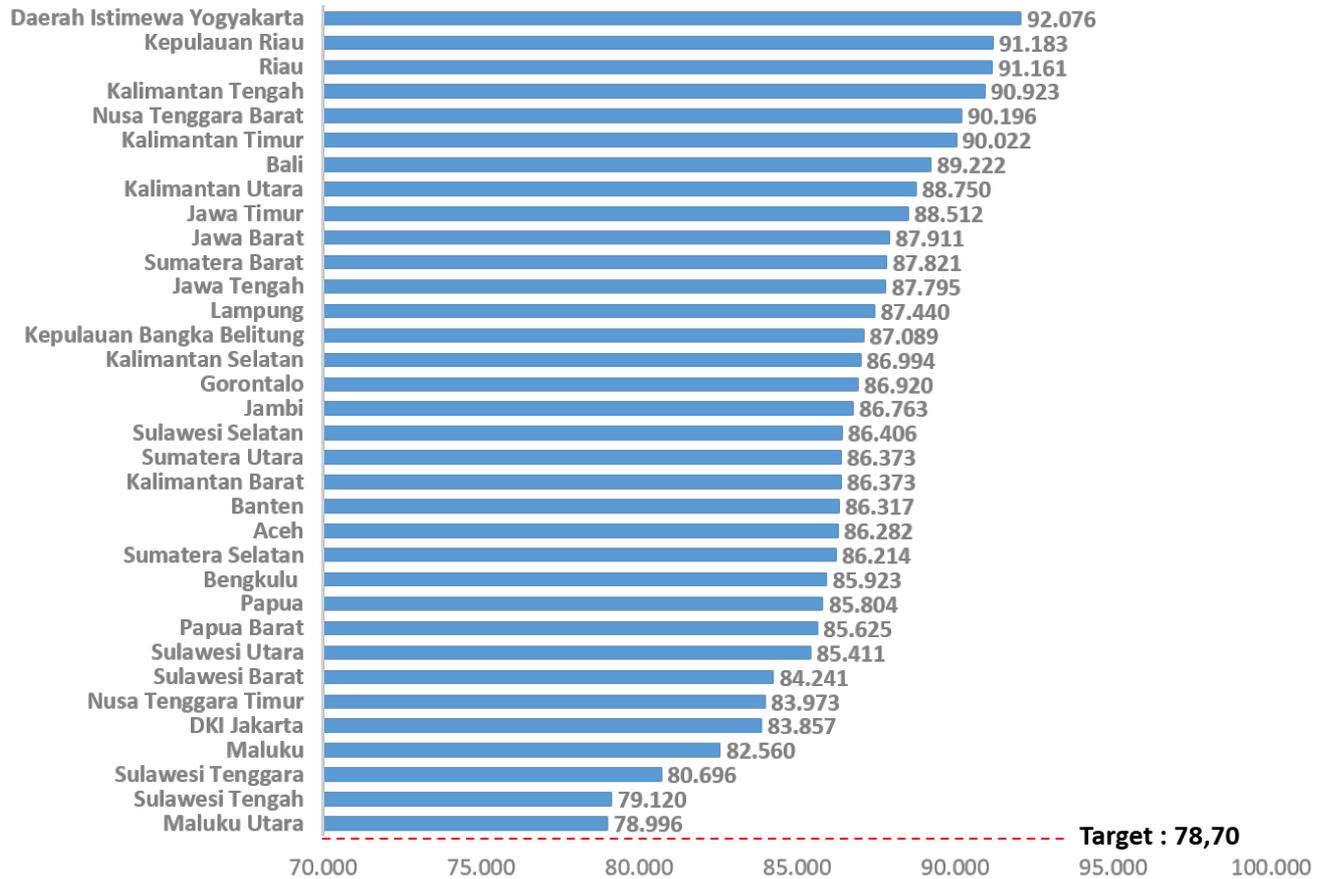
LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI

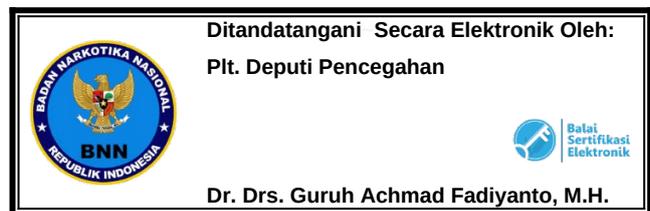
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

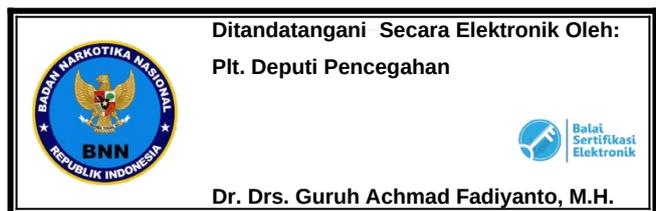
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - c. Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

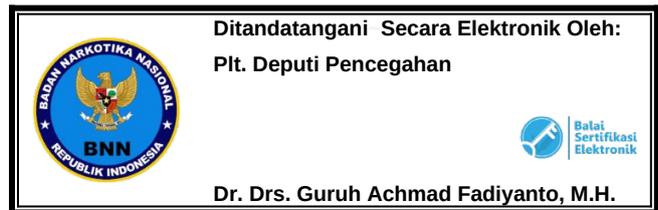
REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 9 (sembilan) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama TA. 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2024;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/909/VIII/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga TA. 2024;
- h. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 418 unit IBM pada bulan Desember 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi capaian program, faktor pendukung serta penghambat implementasi program IBM sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di tahun anggaran 2025.

3. Hasil evaluasi operasionalisasi unit IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Capaian fase perkembangan unit IBM

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota serta telaah bukti dukung pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM, diperoleh capaian fase perkembangan unit IBM sebagai berikut:

- Sebanyak 99 unit IBM (23,68%) memenuhi indikator fase Prima
- Sebanyak 221 unit IBM (52,97%) memenuhi indikator fase Tangguh
- Sebanyak 49 unit IBM (11,72%) memenuhi indikator fase Berkembang
- Sebanyak 32 unit IBM (7,66%) memenuhi indikator fase Tumbuh
- Sebanyak 15 unit IBM (3,59%) memenuhi indikator fase Rintisan
- Sebanyak 2 unit (0,48%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 401 unit (95,93%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh, dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi, Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), serta AP telah dapat menemu kenali dan berhasil menjangkau klien untuk dilakukan skrining dengan menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya kemudian klien diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan IBM

Kegiatan IBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh AP di luar kegiatan layanan pemulihan, meliputi sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan. Idealnya, kegiatan IBM dilakukan pada awal program dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami manfaat dan memberikan kontribusi dalam memajukan program IBM. AP dalam melakukan kegiatan IBM senantiasa memerlukan pendampingan intensif dari petugas BNNP & BNNK/ Kota. Dari hasil evaluasi di Tahun 2024 ini AP telah melakukan sosialisasi IBM sebanyak 3.277 kali kepada 73.749 audiens, pemetaan 1.330 kali, dan penjangkauan dilakukan kepada 3.073 orang.

c. Gambaran layanan IBM

Layanan intervensi IBM adalah rangkaian kegiatan yang diberikan oleh AP kepada klien IBM mulai dari skrining, penerimaan awal, layanan intervensi wajib dan pilihan serta layanan bina lanjut. Layanan IBM diberikan oleh AP kepada klien tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota secara komprehensif serta keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat dalam upaya pemulihan dan pemantauan terhadap klien. Pada Tahun 2024 tercatat keterlibatan anggota keluarga/ orang terdekat dalam layanan IBM sejumlah 1.819 orang yang terdiri dari orang tua, kakak, adik, suami/ istri, paman/ bibi atau guru sebagai wali murid di sekolah, walaupun terdapat beberapa klien IBM yang memilih untuk tidak melibatkan keluarga dengan alasan takut, malu, ataupun berdomisili jauh dari keluarga.

d. Gambaran profil klien IBM

Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2024 sebanyak 2.310 orang dengan profil berikut:

- Mayoritas klien merupakan hasil penjangkauan AP yaitu 98,40% (2.273 orang)
- Sebanyak 93,90% (2.169 orang) klien berjenis kelamin laki-laki, dan kebanyakan dalam kelompok usia 17-25 tahun (38,01%) dan 26-35 tahun (26,36%)

- Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (53,12%), mayoritas bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan/ pekebun (35,19%) dan pelajar/ mahasiswa (25,19%)
- Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan adalah shabu (34,88%), sedatif/ hipnotik (9,71%) dan kanabis (8,70%)

e. Gambaran Agen Pemulihan

Agen Pemulihan (AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang dipilih oleh Kepala Desa/ Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN. AP yang ditunjuk biasanya merupakan orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa/ kelurahan, sehingga telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Jumlah AP pada tahun 2024 ini terlapor sebanyak 2.210 orang, dengan berbagai latar belakang unsur masyarakat yang berbeda-beda, mayoritas adalah laki-laki dan berasal dari unsur tokoh masyarakat (29,50%).

f. Gambaran pendanaan mandiri untuk IBM

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 115 unit IBM (27,51%) telah memperoleh pendanaan mandiri untuk operasional unit IBM serta pelaksanaan kegiatan & layanan. Pendanaan mandiri ini merupakan hasil sosialisasi, koordinasi dan advokasi yang dilakukan oleh AP dengan pendampingan serta pembinaan penuh petugas BNNP & BNNK/Kota. Dukungan dana diperoleh dari desa, kelurahan, OPD, iuran/ sumbangan/ donasi, dan/ atau CSR dengan rentang nilai mulai dari Rp 875.000,- sampai dengan Rp 172.133.000,-.

g. Hasil survey kebermanfaatan program IBM terhadap lingkungan & Masyarakat

Dalam rangka mengetahui dampak kegiatan IBM serta kebermanfaatannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat melalui petugas BNNP & BNNK/Kota melakukan survey berupa penyebaran pengisian kuesioner dengan menggunakan skala *likert* pemberian skor 0-4.

survey di lakukan terhadap 4.111 orang responden yang merupakan anggota masyarakat non AP di wilayah desa/ kelurahan. Mayoritas responden berada dalam kelompok usia 36-45 tahun (27,66%), merupakan warga masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi IBM (72,39%). Berdasarkan hasil survey yang telah di lakukan tercatat bahwa mayoritas responden (92,36%) telah mengetahui keberadaan IBM di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, dari pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 0-4 yang berarti bahwa IBM dapat memberikan dampak sangat positif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

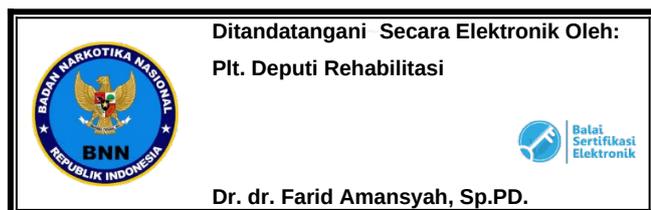
h. Identifikasi faktor pendukung & penghambat implementasi program IBM

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat faktor pendukung keberhasilan program IBM yang harus ditingkatkan, dan faktor penghambat yang harus ditindaklanjuti agar dapat diatasi. beberapa faktor pendukung & faktor penghambat yang dikategorikan sesuai dengan pelaksana program IBM, diantaranya adalah:

- Petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota
- Agen Pemulihan (AP)
- Kepala Desa/ Lurah

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota atas implementasi program IBM tahun 2024. Diharapkan kinerja pada tahun 2024 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) di IBM dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN

**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
Prima (99 unit)					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	Kuta Blang	Kabupaten Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	Juli	Kabupaten Bireuen
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya Punteuet	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	Simpang Tiga	Kabupaten Pidie
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	Sukajaya	Kota Sabang
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	Sukamakmue	Kota Sabang
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	Tanjung Pura	Kabupaten Langkat
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	Berandan Barat	Kabupaten Langkat
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	Meranti	Kabupaten Asahan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim	Sei Dadap	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Hasak		Asahan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Panyabungan Barat	Kabupaten Mandailing Natal
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	Kabupaten Serdang Bedagai
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	Hatonduhan	Kabupaten Simalungun
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	Datuk Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
20	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	Pariaman Utara	Kota Pariaman
21	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Tanjung Telang	Prabumulih Barat	Kota Prabumulih
22	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	Umpu Semenguk	Kabupaten Way Kanan
23	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Girimaya	Kota Pangkalpinang
24	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Rangkui	Kota Pangkalpinang
25	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	Merawang	Kabupaten Bangka
26	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Singaran Pati	Kota Bengkulu
27	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Pesanggrahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
28	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara
29	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Cilincing	Kota Administrasi Jakarta Utara
30	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	Cipanas	Kabupaten Cianjur
31	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	Cibeber	Kabupaten Cianjur
32	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	Ciomas	Kabupaten Bogor
33	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	Parung	Kabupaten Bogor
34	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Samarang	Kabupaten Garut
35	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Banyuresmi	Kabupaten Garut
36	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	Baregbeg	Kabupaten Ciamis
37	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	Cihaurbeuti	Kabupaten Ciamis
38	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Pancalang	Kabupaten Kuningan

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
39	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	Tempuran	Kabupaten Karawang
40	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	Cilamaya Wetan	Kabupaten Karawang
41	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Gayamsari	Kota Semarang
42	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	Bansari	Kabupaten Temanggung
43	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	Jumo	Kabupaten Temanggung
44	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Mertoyudan	Kabupaten Magelang
45	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Ringinarum	Kabupaten Kendal
46	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	Padamara	Kabupaten Purbalingga
47	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Kemangkon	Kabupaten Purbalingga
48	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	Kandeman	Kabupaten Batang
49	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	Sumbang	Kabupaten Banyumas
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	Kembaran	Kabupaten Banyumas
52	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo
53	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	Panjatan	Kabupaten Kulon Progo
54	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
55	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
56	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
57	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduadi	Mlati	Kabupaten Sleman
58	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Potorono	Banguntapan	Kabupaten Bantul
59	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Bangunharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
60	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Lamongan	Kabupaten Lamongan
61	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Cerme	Kabupaten Gresik
62	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	Kedamean	Kabupaten Gresik
63	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	Magersari	Kota Mojokerto
64	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	Kranggan	Kota Mojokerto

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
65	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	Kanigoro	Kabupaten Blitar
66	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	Nglegok	Kabupaten Blitar
67	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	Batu	Kota Batu
68	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	Junrejo	Kota Batu
69	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Tuban	Kabupaten Tuban
70	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	Waru	Kabupaten Sidoarjo
71	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	Waru	Kabupaten Sidoarjo
72	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Pogalan	Kabupaten Trenggalek
73	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
74	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kwagean	Loceret	Kabupaten Nganjuk
75	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	Kota	Kota Kediri
76	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	Sukun	Kota Malang
77	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	Sukun	Kota Malang
78	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	Ngasem	Kabupaten Kediri
79	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	Puncu	Kabupaten Kediri
80	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Kecamatan Jambangan	Kota Surabaya
81	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Kecamatan Rungkut	Kota Surabaya
82	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Pontianak Kota	Kota Pontianak
83	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
84	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
85	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Tarakan Timur	Kota Tarakan
86	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan
87	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Samarinda Ulu	Kota Samarinda
88	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	Tamako	Kabupaten Kepulauan Sangihe
89	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dolo	Kabupaten Sigi
90	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	Dolo	Kabupaten Sigi
91	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan	Palu Utara	Kota Palu

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Mamboro Barat		
92	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	Banawa Tengah	Kabupaten Donggala
93	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	Banawa	Kabupaten Donggala
94	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	Seririt	Kabupaten Buleleng
95	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	Seririt	Kabupaten Buleleng
96	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar
97	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar
98	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
99	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
Tangguh (221 unit)					
1	Aceh	BNNP ACEH	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP ACEH	Gampong Meureu Baro	Indrapuri	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peulanggahan	Kuta Raja	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Mesjid Tuha	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Lhok	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Caleue	Indra Jaya	Kabupaten Pidie
7	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Sukarejo	Langsa Timur	Kota Langsa
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Pondok Pabrik	Langsa Lama	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Sialang Rayeuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
10	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Kampung Bukit	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
11	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Desa Kutelintang	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
12	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia	Medan Deli	Kota Medan
13	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Medan Deli	Kota Medan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Kubu Simbelang	Tiga Panah	Kabupaten Karo
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Doulu	Berastagi	Kabupaten Karo
16	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Berngam	Binjai Kota	Kota Binjai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
17	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Rambung Dalam	Binjai Selatan	Kota Binjai
18	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kota Tanjungbalai
19	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara	Kota Tanjungbalai
20	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Lasara Bahili	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
21	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Sisobahili Tabaloho	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Pagar Jati	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
23	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Bane	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar
24	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Sukaraja	Siantar Marihat	Kota Pematangsiantar
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Kelurahan Pidoli Dolok	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Huta Tonga	Angkola Muara Tais	Kabupaten Tapanuli Selatan
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Sigalangan	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan
28	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Damar Sari	Padang Hilir	Kota Tebing Tinggi
29	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Persiakan	Padang Hulu	Kota Tebing Tinggi
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Tanjung Pasir	Tanah Jawa	Kabupaten Simalungun
31	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Damuli Kebun	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
32	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Pasir	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
33	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Kelurahan Limau Manis	Pauh	Kota Padang
34	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Muara Panas	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
35	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Kinari	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
36	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Santur	Barangin	Kota Sawahlunto
37	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Salak	Talawi	Kota Sawahlunto
38	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
39	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Bancah Kariang	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
40	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
41	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Kandis	Kandis	Kabupaten Siak

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Kota		
42	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Bagan Hulu	Bangko	Kabupaten Rokan Hilir
43	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Tebing Tinggi	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
44	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Simandolak	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
45	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Simpang Beringin	Bandar Sei Kijang	Kabupaten Pelalawan
46	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mekar Jaya	Pangkalan Kerinci	Kabupaten Pelalawan
47	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Kampung Baru	Senapelan	Kota Pekanbaru
48	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Bencah Lesung	Tenayan Raya	Kota Pekanbaru
49	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Dumai Selatan	Kota Dumai
50	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Pangkalan Sesai	Dumai Barat	Kota Dumai
51	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Talang Belido	Sungai Gelam	Kabupaten Muaro Jambi
52	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Danau Kedap	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
53	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Sidomukti	Dendang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
54	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Teluk Majelis	Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
55	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Kenali Asam Bawah	Kota Baru	Kota Jambi
56	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Asam	Pasar Jambi	Kota Jambi
57	Jambi	BNN Kab Batanghari	Desa Terusan	Maro Sebo Ilir	Kabupaten Batanghari
58	Jambi	BNN Kab Batanghari	Desa Pematang V Suku	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari
59	Sumatera Selatan	BNNP SUMATERA SELATAN	Desa Teluk	Lais	Kabupaten Musi Banyuasin
60	Sumatera Selatan	BNN Provinsi Sumatera Selatan	Desa Gasing	Talang Kelapa	Banyuasin
61	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Watervang	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
62	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Jungul	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
63	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
64	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Muara Gula Baru	Ujan Mas	Kabupaten Muara Enim
65	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Lubuk Empelas	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
66	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Jatimulyo	Jati Agung	Kabupaten Lampung

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Selatan
67	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Kibang	Metro Kibang	Kabupaten Lampung Timur
68	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	Sumberejo	Kabupaten Tanggamus
69	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kecapi	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
70	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
71	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Yosomulyo	Metro Pusat	Kota Metro
72	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Margorejo	Metro Selatan	Kota Metro
73	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Mataram Baru	Mataram Baru	Kabupaten Lampung Timur
74	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Sri Menanti	Bandar Sri Bhawono	Kabupaten Lampung Timur
75	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Cugah	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
76	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
77	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Saga	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
78	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Rayak	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
79	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Toboali	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
80	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Sadai	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
81	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Kelurahan Sungai Langkai	Kecamatan Sagulung	Kota Batam
82	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Tanjung Uncang	Batu Aji	Kota Batam
83	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Buliang	Batu Aji	Kota Batam
84	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Air Raja	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
85	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Kampung Baru	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
86	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Sawang Laut	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
87	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Tanjung Berlian Barat	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
88	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
89	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Lempuing	Ratu Agung	Kota Bengkulu
90	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Barat	Gading Cempaka	Kota Bengkulu
91	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Palmerah	Kota Administrasi

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Jakarta Barat
92	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Petamburan	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
93	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	Kota Administrasi Jakarta Selatan
94	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang	Pulo Gadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
95	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas	Ciracas	Kota Administrasi Jakarta Timur
96	Banten	BNNP BANTEN	Desa Baros	Baros	Kabupaten Serang
97	Banten	BNNP BANTEN	Kelurahan Banten	Kasemen	Kota Serang
98	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Jombang	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
99	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Bendungan	Cilegon	Kota Cilegon
100	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamanbaru	Citangkil	Kota Cilegon
101	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Tanah Tinggi	Tangerang	Kota Tangerang
102	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Cipondoh Makmur	Cipondoh	Kota Tangerang
103	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukatani	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
104	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukajaya	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
105	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Pangandaran	Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
106	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jayanti	Kiaracondong	Kota Bandung
107	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kacapiring	Batununggal	Kota Bandung
108	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Cibabat	Cimahi Utara	Kota Cimahi
109	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Melong	Cimahi Selatan	Kota Cimahi
110	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cipada	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
111	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Batujajar Barat	Batujajar	Kabupaten Bandung Barat
112	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Loji	Simpenan	Kabupaten Sukabumi
113	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Pasirsuren	Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi
114	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Cisolak Pasar	Cimanggis	Kota Depok
115	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok	Beji	Kota Depok

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Cina		
116	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Sukamanah	Cipedes	Kota Tasikmalaya
117	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Cipedes	Cipedes	Kota Tasikmalaya
118	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pagundan	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
119	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Sunyaragi	Kecamatan Kesambi	Kota Cirebon
120	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kebonbaru	Kejaksan	Kota Cirebon
121	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Pedurungan	Kota Semarang
122	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Pajang	Laweyan	Kota Surakarta
123	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta
124	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten Magelang
125	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Plantaran	Kaliwungu Selatan	Kabupaten Kendal
126	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kemandungan	Tegal Barat	Kota Tegal
127	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kejambon	Tegal Timur	Kota Tegal
128	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kalipucang Kulon	Batang	Kabupaten Batang
129	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	Kabupaten Cilacap
130	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Randubango	Mojosari	Kabupaten Mojokerto
131	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Gedongombo	Semanding	Kabupaten Tuban
132	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Mlinjon	Suruh	Kabupaten Trenggalek
133	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Desa Pandanarum	Tempeh	Kabupaten Lumajang
134	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Tompokersan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
135	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Kelurahan Jepun	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
136	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Kedungwaru	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
137	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Lecari	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan
138	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Sumber Suko	Gempol	Kabupaten Pasuruan
139	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sepanjang	Gondanglegi	Kabupaten Malang
140	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Landungsari	Dau	Kabupaten Malang
141	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Aengbaja Kenek	Bluto	Kabupaten Sumenep

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
142	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Bumbungan	Bluto	Kabupaten Sumenep
143	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Kalimook	Kalianget	Sumenep
144	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Desa Hilir Kantor	Ngabang	Kabupaten Landak
145	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Kelurahan Suka Harja	Delta Pawan	Kabupaten Ketapang
146	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Parit Mayor	Pontianak Timur	Kota Pontianak
147	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
148	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
149	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Kelurahan Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
150	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Baamang Barat	Baamang	Kabupaten Kotawaringin Timur
151	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Pahandut Seberang	Pahandut	Kota Palangka Raya
152	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Bukit Tunggul	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
153	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Banturung	Bukit Batu	Kota Palangka Raya
154	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
155	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Candi	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
156	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
157	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
158	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
159	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
160	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
161	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Inan	Paringin Selatan	Kabupaten Balangan
162	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Batik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala
163	Kalimantan	BNN Kab. Barito	Desa Sungai Lirik	Bakumpai	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Selatan	Kuala			Barito Kuala
164	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
165	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Nusa Indah	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut
166	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Suga	Haur Gading	Kabupaten Hulu Sungai Utara
167	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Pakacangan	Amuntai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
168	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Mangkupum	Muara Uya	Kabupaten Tabalong
169	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Karang Mumus	Samarinda Kota	Kota Samarinda
170	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margasari	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
171	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Desa Jelarai Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
172	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Kelurahan Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan
173	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Sanur	Tulin Onsoi	Kabupaten Nunukan
174	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Harapan	Sebuku	Kabupaten Nunukan
175	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Perkamil	Paal Dua	Kota Manado
176	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Airmadidi Atas	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara
177	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Kelurahan Inobonto	Bolaang	Kabupaten Bolaang Mongondow
178	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Dondomon	Dumoga Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow
179	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Girian Indah	Girian	Kota Bitung
180	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Manembo-Nembo	Matuari	Kota Bitung
181	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Kleak	Malalayang	Kota Manado
182	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Karame	Singkil	Kota Manado
183	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Kendahe Satu	Kendahe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
184	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Taipa	Palu Utara	Kota Palu
185	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Kelurahan Dondo Barat	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
186	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Labuan	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
187	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Tenrigangkae	Mandai	Kabupaten Maros
188	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Panakkukang	Pallangga	Kabupaten Gowa
189	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pakkasalo	Sibulue	Kabupaten Watampone
190	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pattiro Riolo	Sibulue	Kabupaten Watampone
191	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Amassangan	Wara	Kota Palopo
192	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Luminda	Wara Utara	Kota Palopo
193	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Andadowi	Sampara	Kabupaten Konawe
194	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Tanggobu	Morosi	Kabupaten Konawe
195	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Konawehea	Samaturu	Kabupaten Kolaka
196	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Ulu Konawehea	Samaturu	Kabupaten Kolaka
197	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Wua-Wua	Wua-Wua	Kota Kendari
198	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolomoko	Kokalukuna	Kota Baubau
199	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolokatapi	Wolio	Kota Baubau
200	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Kelurahan Simboro	Simboro Kepulauan	Kota Mamuju
201	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Desa Topoyo	Topoyo	Kabupaten Mamuju Tengah
202	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Lantora	Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
203	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Laliko	Campalagian	Kabupaten Polewali Mandar
204	Maluku	BNNP MALUKU	Negeri Hitumessing	Leihitu	Kabupaten Maluku Tengah
205	Maluku	BNN Kota Tual	Desa Ohoitel	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
206	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Lodar El	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
207	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Daruba	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
208	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Gotalamo	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
209	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Tongowai	Tidore Selatan	Kota Tidore Kepulauan
210	Bali	BNNP BALI	Desa Kediri	Kediri	Kabupaten Tabanan
211	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Akah	Klungkung	Kabupaten Klungkung
212	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Barat	Cakranegara	Kota Mataram

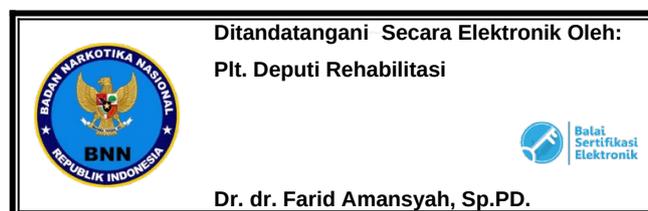
No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
213	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Gomong	Selaparang	Kota Mataram
214	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Utara	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
215	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
216	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tabulo	Mananggu	Kabupaten Boalemo
217	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Wonggahu	Paguyaman	Kabupaten Boalemo
218	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Buliide	Kota Barat	Kota Gorontalo
219	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tomulubutao	Dungingi	Kota Gorontalo
220	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kampung Aimasi	Distrik Prafi	Kabupaten Manokwari
221	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kelurahan Manokwari Barat	Kecamatan Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari
Berkembang (49 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Jawa Kanan SS	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
4	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Tanjung Tawang	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Jaya Tunggal	Tuah Negeri	Kabupaten Musi Rawas
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sumber Asri	Sumber Harta	Kabupaten Musi Rawas
7	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Muara Batun	Jejawi	Kabupaten Ogan Komering Ilir
8	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Celikah	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
9	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Desa Landbaw	Gisting	Kabupaten Tanggamus
10	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Dusun Tengah	Seginim	Kabupaten Bengkulu Selatan
11	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Tanggo Raso	Pino Raya	Kabupaten Bengkulu Selatan
12	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Cempaka Putih	Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
13	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Hegarmanah	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
14	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Ciptasari	Pamulihan	Kabupaten Sumedang
15	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Sekip Lama	Singkawang Tengah	Kota Singkawang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
16	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Jawa (Kampung Jawa)	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
17	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hilir	Meliau	Kabupaten Sanggau
18	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hulu	Meliau	Kabupaten Sanggau
19	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Kumba	Jagoi Babang	Kabupaten Bengkayang
20	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Lembang	Sanggau Ledo	Kabupaten Bengkayang
21	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Tanjung Puri	Sintang	Kabupaten Sintang
22	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Ladang	Sintang	Kabupaten Sintang
23	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Kelurahan Kandangan Kota	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
24	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Karang Jawa	Padang Batung	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
25	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Lawanga Tawongan	Poso Kota Utara	Kabupaten Poso
26	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Lemo	Makale Utara	Kabupaten Tana Toraja
27	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Ariang	Makale	Kabupaten Tana Toraja
28	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Tampo	Napabalano	Kabupaten Muna
29	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Palangga	Duruka	Kabupaten Muna
30	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Lepo-Lepo	Baruga	Kota Kendari
31	Maluku	BNNP MALUKU	Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	Kota Ambon
32	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Tikbari	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
33	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Debowae	Waelata	Kabupaten Buru
34	Bali	BNNP BALI	Desa Banjar Anyar	Kediri	Kabupaten Tabanan
35	Bali	BNN Kab. Klungkung	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Klungkung	Kabupaten Klungkung
36	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Nipa	Ambalawi	Kabupaten Bima
37	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Nae	Rasanae Barat	Kota Bima
38	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sampir	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
39	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Kelurahan Arab Kenangan	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
40	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Plampang	Plampang	Kabupaten Sumbawa
41	NTB	BNN Kab.	Desa Moyo Mekar	Moyo Hilir	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
		Sumbawa			Sumbawa
42	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
43	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Liliba	Oebobo	Kota Kupang
44	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Naimata	Maulafa	Kota Kupang
45	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
46	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Talulobutu Selatan	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
47	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Ardipura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
48	Papua	BNN Kab. Mimika	Inauga	Wania	Mimika
49	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kelurahan Dobonsolo	Sentani	Kabupaten Jayapura
Tumbuh (32 unit)					
1	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Sicincin	Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Sakatiga	Indralaya	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Muara Siban	Dempo Utara	Kota Pagar Alam
4	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Selibar	Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Air Putih	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
7	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Kabupaten Bintan
8	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	Mojoarjo	Kota Kediri
9	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Wirang	Haruai	Kabupaten Tabalong
10	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Petung	Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
11	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Nipah-Nipah	Kecamatan Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
12	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
13	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Bontang Utara	Kota Bontang
14	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Tinangkung	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
15	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Mansamat B	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Kepulauan
16	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahoea Reko-Reko	Bungku Barat	Kabupaten Morowali
17	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Maliaro	Ternate Tengah	Kota Ternate
18	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Ternate Selatan	Kota Ternate
19	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kepulauan
20	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bakbakan	Gianyar	Kabupaten Gianyar
21	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Tegal Tugu	Gianyar	Kabupaten Gianyar
22	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Pempatan	Rendang	Kabupaten Karangasem
23	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Rendang	Rendang	Kabupaten Karangasem
24	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
25	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Atambua	Kota Atambua	Kabupaten Belu
26	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tohe	Raihat	Kabupaten Belu
27	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Pentadio Barat	Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo
28	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Tolotio	Tibawa	Kabupaten Gorontalo
29	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolite Jaya	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
30	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolinggula Ulu	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
31	Papua	BNN Kab. Mimika	Sempan	Mimika Baru	Mimika
32	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Dosay	Sentani Barat	Kabupaten Jayapura
Rintisan (15 unit)					
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Mibo	Banda Raya	Kota Banda Aceh
2	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Ie Mirah	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
3	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
4	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Belo Laut	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
5	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Benda Baru	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
6	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Benda	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
7	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pekauman	Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
8	Kalimantan	BNN Kota Bontang	Kelurahan	Bontang Barat	Kota Bontang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Timur		Belimbing		
9	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Desa Malei	Lage	Kabupaten Poso
10	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Lanona	Bungku Tengah	Kabupaten Morowali
11	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Mengwitani	Mengwi	Kabupaten Badung
12	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Kerobokan Kaja	Kuta Utara	Kabupaten Badung
13	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Ofalangga	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
14	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Tesabela	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
15	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
Pra Fase (2 unit)					
1	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gorua	Tobelo Utara	Kabupaten Halmahera Utara
2	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Toweka	Galela	Kabupaten Halmahera Utara



REKAPITULASI CAPAIAN FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM PER PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tangguh	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0	2	0	0	10	10
2	Sumatera Utara	0	0	0	1	21	10
3	Sumatera Barat	0	0	1	0	8	1
4	Riau	0	0	0	0	10	0
5	Jambi	0	0	0	0	8	0
6	Sumatera Selatan	0	1	4	7	7	1
7	Lampung	0	0	0	1	10	1
8	Kep. Bangka Belitung	0	1	1	0	5	3
9	Kepulauan Riau	0	0	1	0	7	0
10	Bengkulu	0	0	0	2	3	1
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	5	3
12	Banten	0	2	0	1	7	0
13	Jawa Barat	0	0	0	2	18	11
14	Jawa Tengah	0	0	0	0	9	11
15	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	8
16	Jawa Timur	0	0	1	0	14	22
17	Kalimantan Barat	0	0	0	8	6	2
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	6	0
19	Kalimantan Selatan	0	1	1	2	13	1
20	Kalimantan Timur	0	1	4	0	2	1
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	4	2
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	9	1
23	Sulawesi Tengah	0	2	3	1	3	5
24	Sulawesi Selatan	0	0	0	2	6	0
25	Sulawesi Tenggara	0	0	0	3	7	0
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	4	0
27	Maluku	0	0	0	3	3	0

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tanggung	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Maluku Utara	2	0	3	0	3	0
29	Bali	0	2	4	2	2	4
30	NTB	0	0	0	6	2	2
31	NTT	0	2	3	3	0	0
32	Gorontalo	0	0	4	2	6	0
33	Papua	0	1	2	3	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	2	0



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Plt. Deputi Rehabilitasi



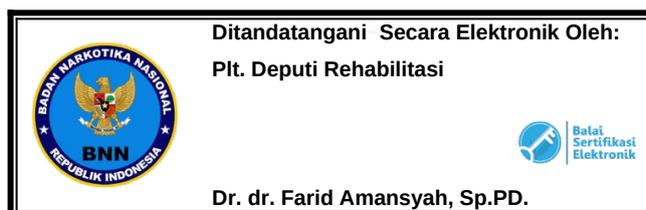

Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

GAMBARAN KEGIATAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024



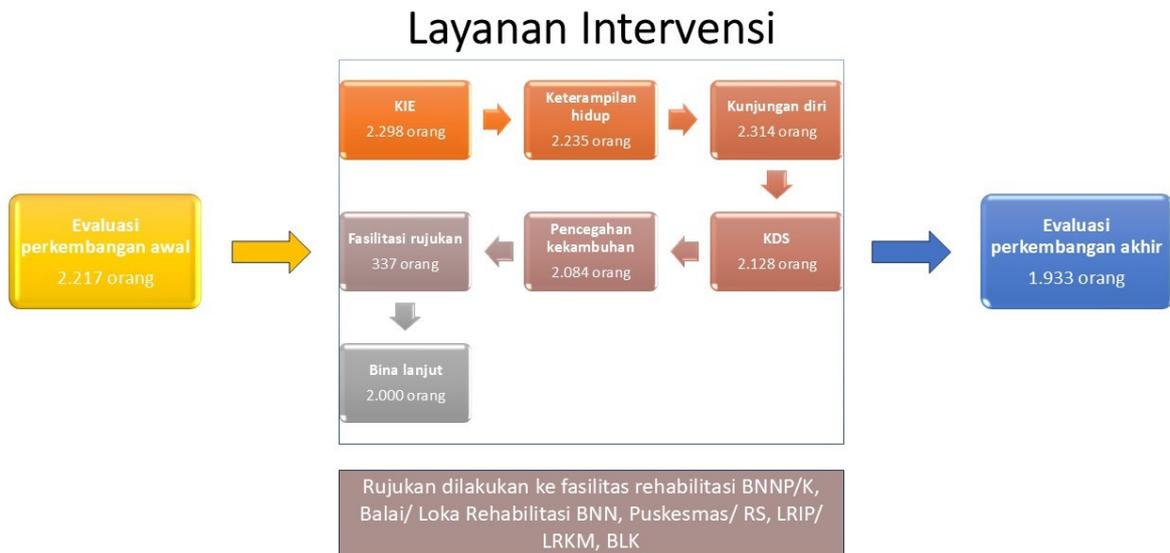
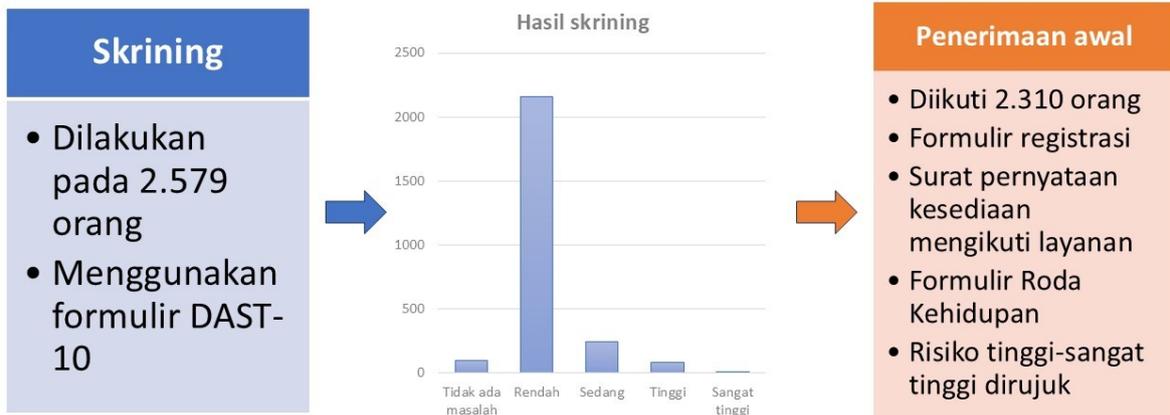
Kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota di tahun 2024 adalah:

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 3.277 kali, dengan total peserta/ audiens sejumlah 73.749 orang. Sosialisasi dilakukan secara formal maupun informal, serta menggunakan media sosial. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.330 kali di 1.853 RT/ dusun/ banjar, dan memperoleh informasi estimasi jumlah penyalah guna narkotika sebanyak 6.613 orang. Kegiatan ini bertujuan memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkotika di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.073 orang penyalah guna narkotika, dan yang bersedia ditindaklanjuti untuk masuk dalam layanan IBM adalah 2.346 orang. Kegiatan ini bertujuan mendekati penyalah guna narkotika dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan IBM. Secara umum, alasan para penyalah guna narkotika menolak mengikuti layanan di IBM antara lain karena merasa belum siap, malu, takut ditangkap polisi, tidak terganggu dengan penyalahgunaan zatnya, tidak diizinkan keluarga, atau sibuk bekerja.



GAMBARAN LAYANAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

Skrining & Penerimaan Awal



Layanan intervensi bagi penyalah guna narkoba di IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota, dengan gambaran berikut:

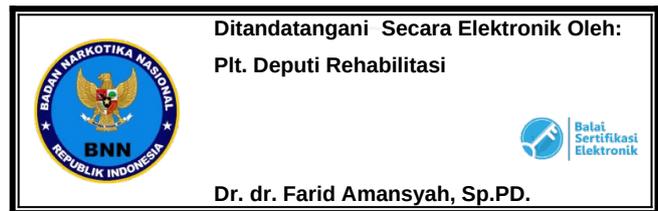
- Skrining dilakukan untuk mengidentifikasi risiko gangguan penggunaan narkoba menggunakan instrumen *Drug Abuse Screening Test* (DAST-10). Jumlah penyalah guna yang diskринing adalah 2.579 orang, dengan hasil:

- Tidak teridentifikasi adanya resiko : 97 orang (3,76%)
- Rendah : 2.158 orang (83,68%)
- Sedang : 243 orang (9,42%)
- Tinggi : 78 orang (3,02%)
- Sangat tinggi : 3 orang (0,12%)

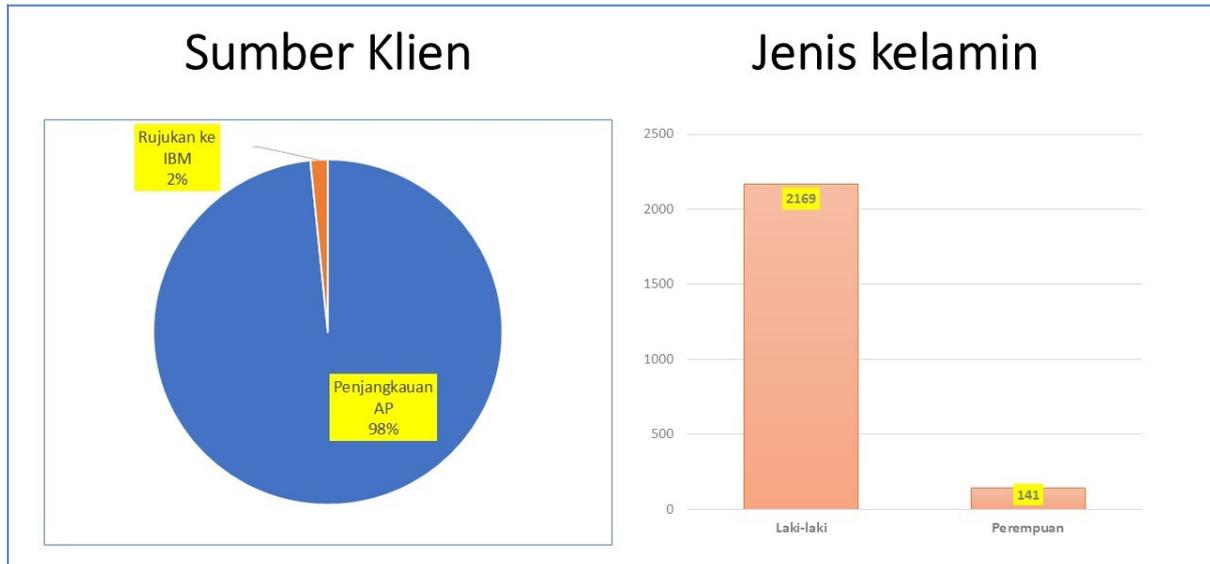
Klien yang dilayani di IBM adalah klien yang berada dalam kategori risiko Rendah hingga Sedang, dengan pendampingan petugas BNNP dan BNNKab/Kota.

- Penyalah guna yang telah diskriminasi dan dirujuk ke IBM untuk mengikuti layanan sebagai klien berjumlah 2.310 orang, semuanya telah mengikuti rangkaian Penerimaan Awal yaitu pengisian formulir registrasi, surat pernyataan kesediaan mengikuti layanan, serta formulir roda kehidupan.
- Klien IBM mengikuti layanan dalam waktu 16 minggu, terdiri dari:
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) telah diikuti oleh 2.298 orang klien. KIE bertujuan meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan mendorong perubahan sikap dan perilaku klien.
 - Keterampilan Hidup telah diikuti 2.235 orang klien, bertujuan membekali klien IBM dengan *soft skill* agar dapat kembali beradaptasi, produktif dan melakukan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
 - Kunjungan diri telah diikuti 2.314 orang klien, yang bertujuan membina hubungan, melakukan pemantauan dan mengetahui kondisi klien dalam lingkungannya sehari-hari. Kunjungan diri juga dilakukan untuk menambah kelengkapan data/ informasi tentang klien melalui wawancara dengan klien dan/ atau dengan anggota keluarga serta hasil observasi lingkungan tempat tinggal klien.
 - Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) telah diikuti 2.128 orang klien secara berkelompok, bertujuan mendorong anggota kelompok untuk saling memberikan dukungan, bertukar pengalaman dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi dan harapan satu sama lain.
 - Pencegahan kekambuhan diikuti 2.084 orang klien secara berkelompok, yang bertujuan membantu klien mengenal faktor pemicu, cara menghindarinya dan membangun keterampilan untuk mengatasi rasa ketagihan serta keterampilan menolak narkoba.
 - Sebanyak 337 orang klien difasilitasi untuk rujukan, antara lain ke fasilitas rehabilitasi BNNP & BNNK/ Kota, Balai/ Loka Rehabilitasi BNN, Puskesmas/ RS, Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah/ komponen masyarakat, dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan kerja para klien agar bisa mandiri dan produktif secara ekonomi.

- Sebanyak 2.000 orang (86,58% dari jumlah klien) telah mengikuti rangkaian layanan bin a lanjut, yaitu penilaian pascarehabilitasi, pemantauan, pendampingan pemulihan, dan t erminasi yang dilakukan secara simultan oleh AP dan petugas BNNP & BNNK/ Kota
- Sebanyak 2.217 orang klien dilakukan evaluasi perkembangan tahap awal yaitu URICA, WHO-QoL, dan tes urin. Sementara klien yang telah dilakukan evaluasi perkembangan t ahap akhir adalah 1.933 orang
- Pemulihan penyalah guna narkoba tidak mungkin lepas dari keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat. Pada tahun 2024, jumlah anggota keluarga/ orang terdekat yang dili batkan dalam layanan di IBM adalah 1.819 orang, terdiri dari orang tua, kakak, adik, sua mi/ istri, paman/ bibi atau guru. Beberapa klien IBM memilih untuk tidak melibatkan kelua rga dengan alasan takut, malu, atau berdomisili jauh dari keluarga.



GAMBARAN PROFIL KLIEN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

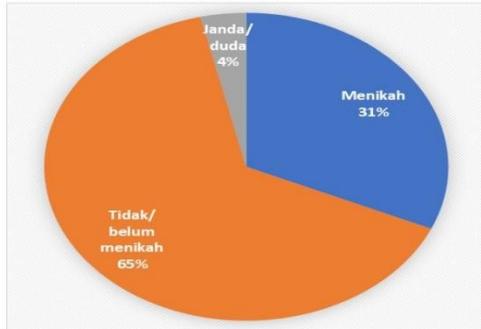


Total klien IBM pada tahun 2024 adalah 2.310 orang. Mayoritas merupakan hasil penjangkauan Agen Pemulihan, dan berjenis kelamin laki-laki.

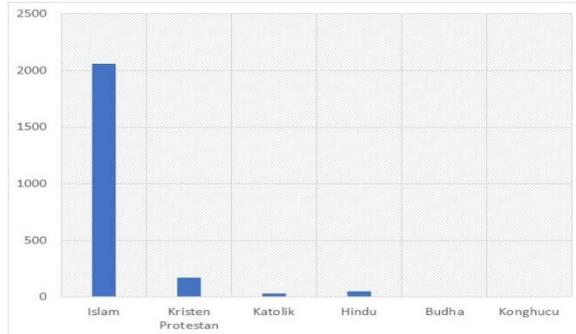


Mayoritas klien berada pada kelompok usia 17-25 tahun, dengan Pendidikan terakhir mayoritas adalah SMA/ sederajat, dan pekerjaan saat ini adalah buruh/ petani/ nelayan

Status Pernikahan

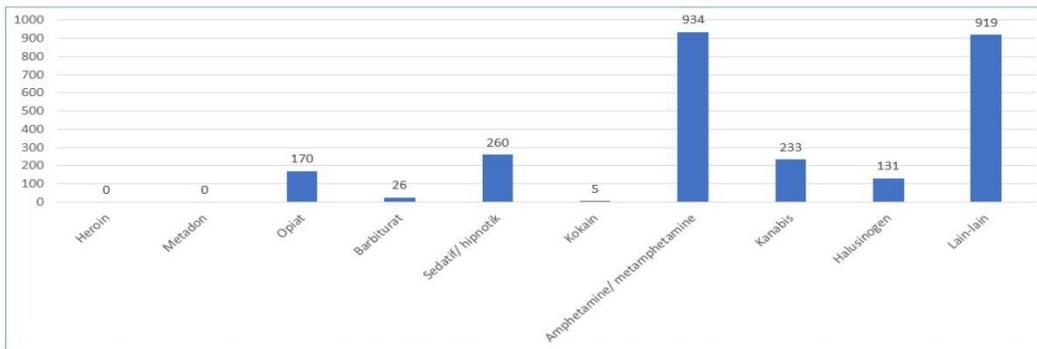


Agama



Mayoritas klien berstatus tidak/ belum menikah, dan mayoritas agama klien adalah Islam

Jenis zat yang digunakan saat ini



Ket: lain-lain mencakup alkohol, obat tanpa resep, inhalansia, komix, samcodin, zenith, bensin, tembakau gorilla, hexymer, tramadol, kratom, LL, carisoprodol, DMP

Jenis zat terbanyak yang digunakan oleh klien IBM adalah shabu, diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik seperti benzodiazepine, dan ganja



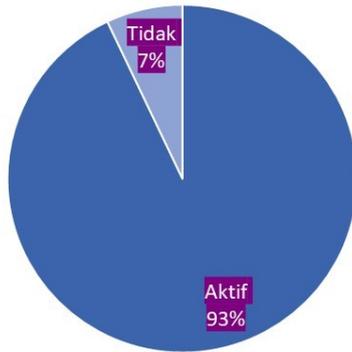
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Rehabilitasi



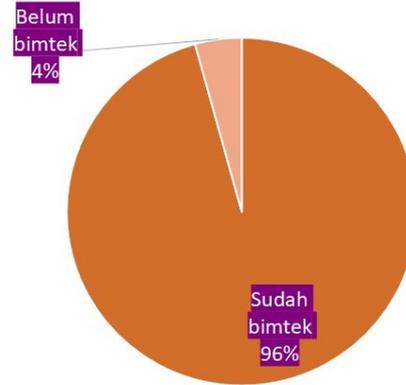

Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

**GAMBARAN AGEN PEMULIHAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

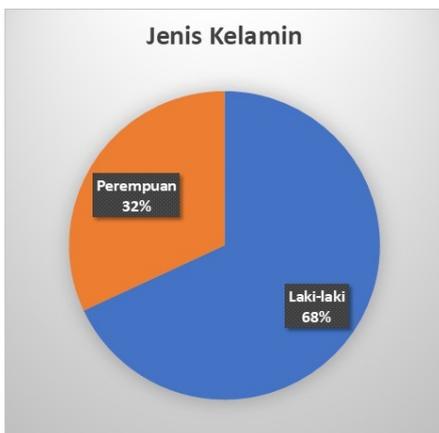
Keaktifan AP



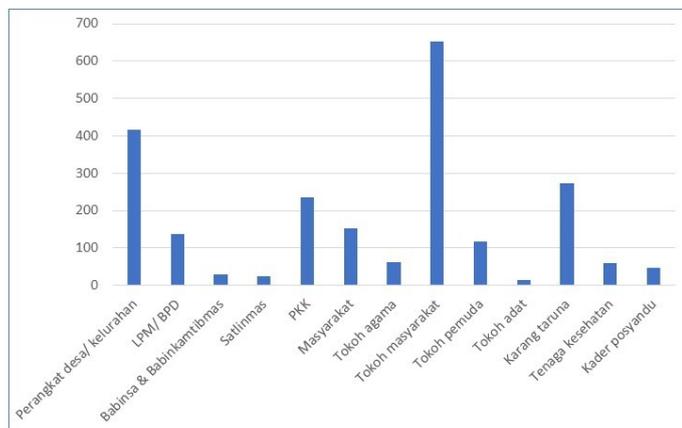
Bimtek AP



Jenis Kelamin



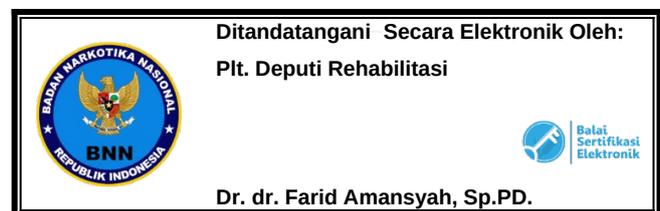
**Latar Belakang
Kemasyarakatan**



Di tahun 2024, gambaran AP sebagai berikut:

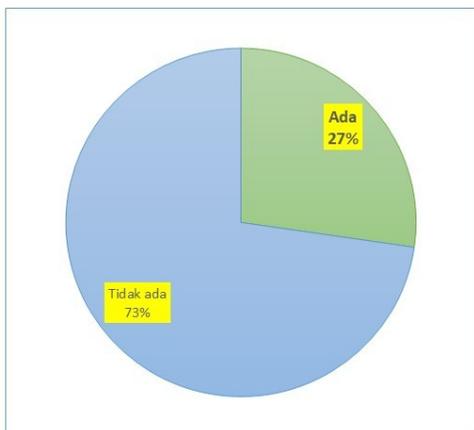
- Jumlah AP tahun 2024 adalah 2.210 orang, dan dari jumlah tersebut hanya 92,94% (2.054 orang) yang aktif menjalankan kegiatan & layanan IBM
- Sebanyak 95,70% dari total AP (2.115 orang) telah dilatih oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) secara resmi, sementara sisanya memperoleh informasi dengan metode tular ilmu di antara sesama AP maupun saat asistensi oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota

- Mayoritas AP yaitu 1.504 orang (68,05%) berjenis kelamin laki-laki
- Latar belakang AP dalam masyarakat terdiri dari:
 - Sebanyak 18,82% (416 orang) merupakan perangkat desa/ kelurahan, 12 orang di antaranya adalah Kepala Desa/ Lurah
 - Sebanyak 6,15% (136 orang) merupakan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/ Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Sebanyak 1,27% (28 orang) adalah perwakilan dari Babinsa dan Babinkamtibmas yang bertugas di Desa/ Kelurahan
 - Sebanyak 1,04% (23 orang) bertugas di Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
 - Sebanyak 10,59% (234 orang) adalah anggota Tim Penggerak PKK
 - Sebanyak 6,88% (152 orang) adalah perwakilan masyarakat, termasuk di antaranya mahasiswa, kelompok seni, pekerja sosial, penggiat/ relawan, dan organisasi kemasyarakatan
 - Sebanyak 2,81% (62 orang) adalah tokoh agama
 - Sebanyak 29,50% (652 orang) adalah tokoh masyarakat, termasuk di antaranya ketua RT, RW, kepala dusun, kepala lingkungan
 - Sebanyak 5,29% (117 orang) adalah tokoh pemuda
 - Sebanyak 0,59% (13 orang) adalah tokoh adat
 - Sebanyak 12,31% (272 orang) adalah ketua maupun anggota karang taruna
 - Sebanyak 2,67% (59 orang) adalah tenaga kesehatan, termasuk di antaranya adalah dokter, perawat dan petugas puskesmas, juga bidan desa
 - Sebanyak 2,08% (46 orang) adalah kader posyandu

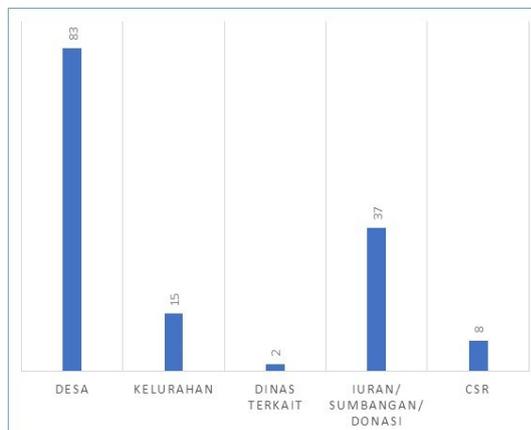


**GAMBARAN PENDANAAN MANDIRI UNTUK UNIT IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pendanaan mandiri



Sumber



Pada tahun 2024, sebanyak 115 dari 418 unit IBM (27,51%) telah memperoleh dukungan pendanaan mandiri, mayoritas berasal dari pemerintah desa. Dukungan dari pihak kelurahan relatif lebih sulit diperoleh karena diperlukan adanya aturan hukum secara resmi yang mengatur hingga ke komponen dan sub komponen kegiatan. Dukungan dana bagi unit IBM yang lokasinya di kelurahan cenderung memanfaatkan iuran/ sumbangan/ donasi dari masyarakat maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan swasta yang berdomisili di lokasi tersebut. Daftar unit IBM yang memperoleh dukungan pendanaan tahun 2024 adalah:

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	APBG	Rp4,000,000	Pembuatan papan nama IBM, struktur, alur, dan kegiatan IBM lainnya
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	APBG	Rp3,000,000	Kegiatan IBM, pembuatan papan nama IBM, struktur organisasi, alur kegiatan
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	RAB Desa	Rp7,500,000	Peningkatan kompetensi satgas narkoba
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya	RAB Desa	Rp20,000,000	ATK, konsumsi, spanduk, honor

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		we	Punteuet			dan atribut satgas
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	RAB Desa	Rp8,864,000	Operasional IBM
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	RAB Gampong	Rp9,557,000	Studi banding ke lembaga rehabilitasi, operasionalisasi IBM
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	RAB Gampong	Rp8,000,000	Kegiatan IBM, insentif AP
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	RAB Desa	Rp10,953,052	Kegiatan IBM selama 10 bulan
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	RAB Desa	Rp10,000,000	Transport AP, kegiatan & layanan IBM
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan & layanan IBM
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	RAB Desa	Rp2,750,000	Honor AP
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim Hasak	RAB Desa Sumbangan warga	Rp5,400,000	Honor AP, sewa posko IBM, konsumsi kegiatan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Dana desa	Rp5,400,000	Transport & insentif bulanan AP
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	RAB Nagori	Rp6,000,000	Insentif AP
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	RAB Desa	Rp7,000,000	Honor AP
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	RAB Desa	Rp5,000,000	Honor AP
21	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	RAB Desa	Rp6,590,000	Sosialisasi IBM
22	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	RAB Desa	Rp10,000,000	Operasional Unit IBM
23	Sumatera	BNN Kota	Desa Tanjung	Dana desa	Rp3,000,000	Honor AP

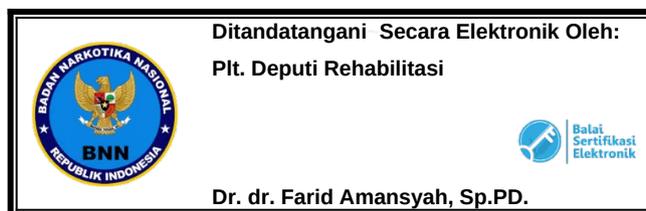
No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Selatan	Prabumulih	Telang			
24	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Dana desa	Rp25,000,000	Sosialisasi (termasuk desa bersinar)
25	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Dana desa	Rp40,000,000	Atribut AP, spanduk, kegiatan sosialisasi, ATK
26	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	RAB Desa	Rp3,000,000	
27	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	RAB Desa	Rp3,000,000	Honor AP
28	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	RAB Kampung	Rp2,594,000	Sosialisasi P4GN
29	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,550,000	Kegiatan & layanan IBM
30	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,850,000	Kegiatan & layanan IBM
31	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	RAB Desa	Rp3,500,000	Kegiatan IBM
32	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	RAB Desa	Rp41,760,000	Honor AP, kegiatan IBM
33	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Dana Kelurahan (pemberdayaan masyarakat)	Rp20,000,000	Sosialisasi P4GN
34	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp2,000,000	Kegiatan IBM, spanduk
35	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp3,450,000	Kegiatan IBM, flyer
36	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Dana kelurahan Sumbangan warga CSR	Rp6,750,000	Spanduk, Kegiatan IBM
37	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	RAB Desa	Rp15,000,000	Kegiatan IBM
38	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	RAB Desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM
39	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan P4GN
40	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp28,103,000	Operasional IBM
41	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Dana Kades	Rp7,300,000	Spanduk, transport AP, konsumsi

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
						kegiatan
42	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Dana Kades Sumbangan masyarakat	Rp3,000,000	Operasional IBM
43	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	RAB Desa	Rp8,850,000	Sosialisasi P4GN
44	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	RAB Desa	Rp9,000,000	Operasional IBM
45	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Sumbangan warga	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
46	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	RAB Desa	Rp15,000,000	Operasional IBM
47	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	RAB Desa	Rp15,005,400	Operasional IBM
48	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Sumbangan dari Kemensos	Rp5,100,000	Modal usaha klien IBM
49	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Sumbangan masyarakat CSR	Rp2,650,000	Operasional IBM
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	RAB Desa	Rp77,623,000	Desa Bersinar Kegiatan IBM (termasuk pembelian CCTV)
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	RAB Desa	Rp7,968,000	Sosialisasi/ penyuluhan
52	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Sumbangan masyarakat	Rp2,500,000	Operasional IBM
53	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Dana desa	Rp2,350,000	Atribut AP, transport klien, sosialisasi IBM
54	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	RAB Desa	Rp5,397,500	Penyuluhan penyalahgunaan narkotika
55	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Dana desa Sumbangan masyarakat	Rp8,100,000	Operasional IBM, banner
56	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	RAB Desa	Rp3,500,000	Operasional IBM
57	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp27,930,000	Sosialisasi P4GN, Rapat AP, sosialisasi
58	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	RAB Desa	Rp875,000	Transport AP
59	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	RAB Desa	Rp2,450,000	Sosialisasi IBM
60	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	APBDes	Rp8,000,000	Sosialisasi IBM
61	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	APBDes	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		A				
62	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Dana Kelurahan	Rp4,330,000	Kegiatan IBM
63	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	RAB Kelurahan LPMK	Rp6,589,800	Workshop P4GN, dukungan pendaftaran kejar paket untuk sekolah klien
64	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sinduharjo	RAB Kelurahan	Rp10,450,000	Layanan IBM
65	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sinduadi	RAB Kelurahan	Rp6,200,000	Sosialisasi IBM
66	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Potorono	Dana desa	Rp3,666,000	Sosialisasi IBM
67	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Bangunharjo	RAB Desa	Rp6,600,000	Sosialisasi IBM
68	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Dana desa luran masyarakat	Rp16,300,000	Operasional IBM
69	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Dana desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
70	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	RAB Desa Sumbangan kades	Rp10,442,000	Sosialisasi IBM + tambahan untuk tes urin
71	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	CSR luran AP	Rp3,250,000	Operasional IBM
72	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	CSR luran AP	Rp3,550,000	Operasional IBM
73	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	RAB Desa	Rp172,133,000	Operasional IBM dalam mendukung P4GN
74	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	RAB Desa	Rp20,000,000	Operasional IBM
75	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	RAB Kelurahan	Rp1,225,000	Sosialisasi bahaya napza
76	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	RAB Desa	Rp21,175,000	Sosialisasi IBM
77	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Dana pemberdayaan kelurahan Sumbangan lurah	Rp3,000,000	Sosialisasi IBM, transport klien
78	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	RAB Desa	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
79	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	luran warga	Rp2,500,000	operasional IBM
80	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Dana desa	Rp15,000,000	Atribut AP, sosialisasi IBM
81	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	RAB Desa	Rp10,000,000	Honor AP, transport klien
82	Jawa Timur	BNN Kab.	Desa	RAB Desa	Rp9,545,000	Honor AP,

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		Nganjuk	Kwagean			transport klien
83	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	RAB Kelurahan	Rp1,150,000	Kegiatan IBM, atribut AP
84	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	RAB Kelurahan	Rp10,000,000	Operasional IBM
85	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	RAB Kelurahan	Rp3,150,000	Operasional IBM
86	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	RAB Kelurahan	Rp8,052,000	Operasional IBM
87	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	APBDes	Rp2,500,000	Operasional IBM
88	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	APBDes	Rp17,365,000	Konsumsi & transport kegiatan IBM
89	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Iuran masyarakat	Rp2,500,000	Kegiatan IBM
90	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Dana Lurah CSR	Rp6,200,000	Atribut AP, stiker, banner
91	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Iuran masyarakat	Rp2,800,000	Operasional IBM
92	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	APBDes	Rp7,430,000	Operasional IBM
93	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	RAB Desa	Rp12,000,000	Kegiatan IBM, media sosialisasi
94	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	APBDes	Rp6,000,000	Kegiatan & layanan IBM
95	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Dana Kelurahan CSR	Rp50,500,000	Study Banding ke Babes Lido, atribut AP, operasional IBM
96	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Dinkes Bidang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Dana kelurahan	Rp. 3.625.000	Sosialisasi IBM
97	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Iuran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
98	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Iuran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
99	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	RAB Kampung	Rp4,075,000	Kegiatan IBM
100	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dana desa	Rp8,950,000	Atribut AP, kegiatan IBM
101	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan IBM, sarana prasarana, transport klien
102	Sulawesi	BNN Kota	Kelurahan	Iuran Pengusaha	Rp2,500,000	Operasional

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Tengah	Palu	Mamboro Barat			IBM
103	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM, transport AP untuk penjangkauan
104	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp16,639,000	transport AP, konsumsi kegiatan & layanan, honor AP
105	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Sumbangan masyarakat	Rp3,500,000	Kegiatan & layanan IBM
106	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	RAB Desa Donatur	Rp43,550,000	Kegiatan IBM
107	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	RAB Desa Donatur	Rp30,700,000	Kegiatan IBM
108	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Sumbangan	Rp4,076,000	Operasional IBM
109	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Sumbangan	Rp2,850,000	Operasional IBM, atribut AP
110	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
111	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
112	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Moyo Mekar	RAB Desa	Rp4,800,000	Sosialisasi, tes urin
113	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Anggaran desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
114	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	RAB Desa	Rp2,000,000	Operasional IBM
115	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	APBDes	Rp10,500,000	Kegiatan IBM



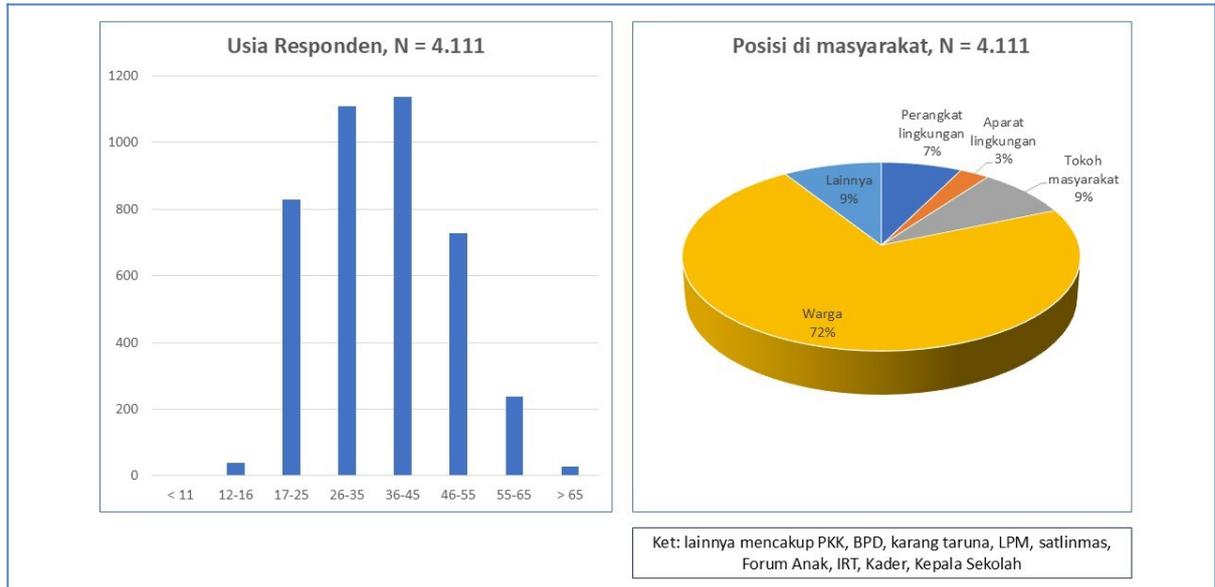
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN VIII
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
TANGGAL : 30 Desember 2024

HASIL SURVEY KEBERMANFAATAN PROGRAM IBM

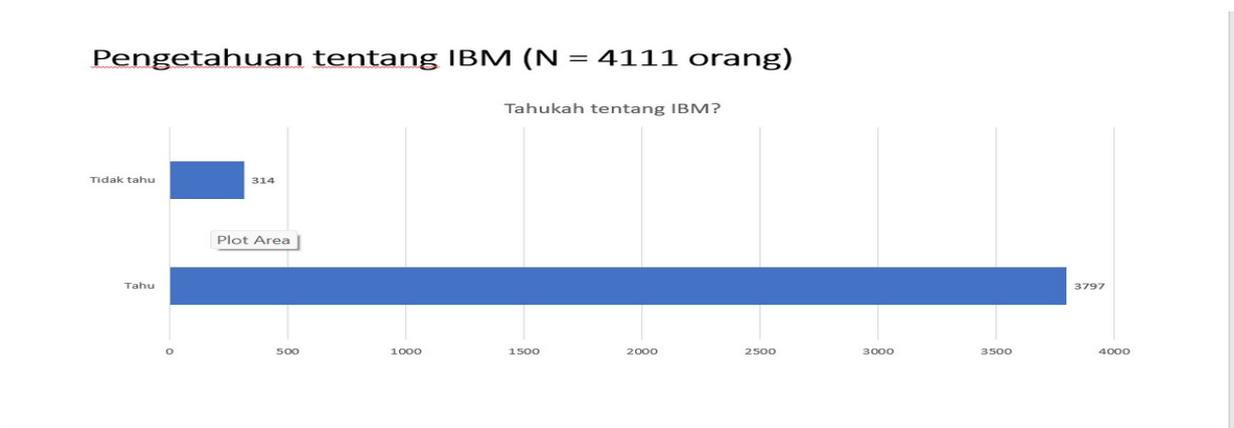
TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

A. Data demografi responden



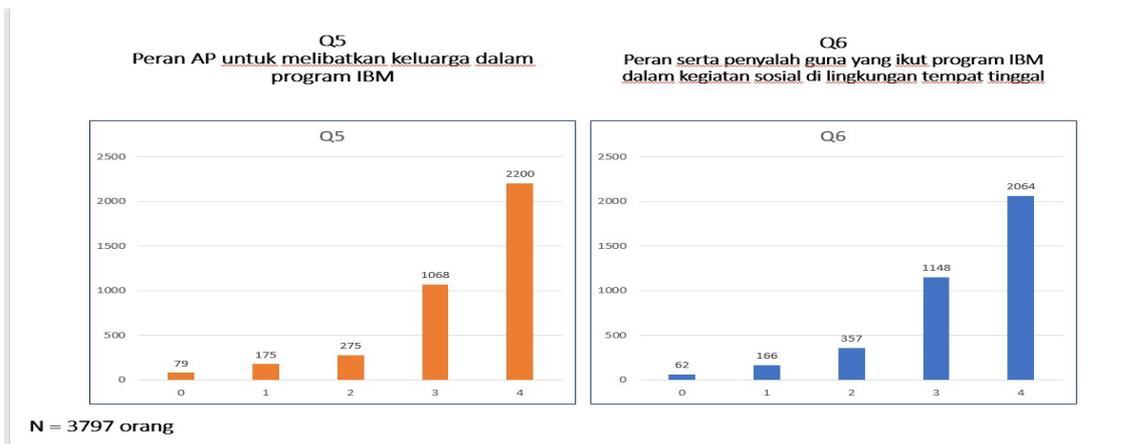
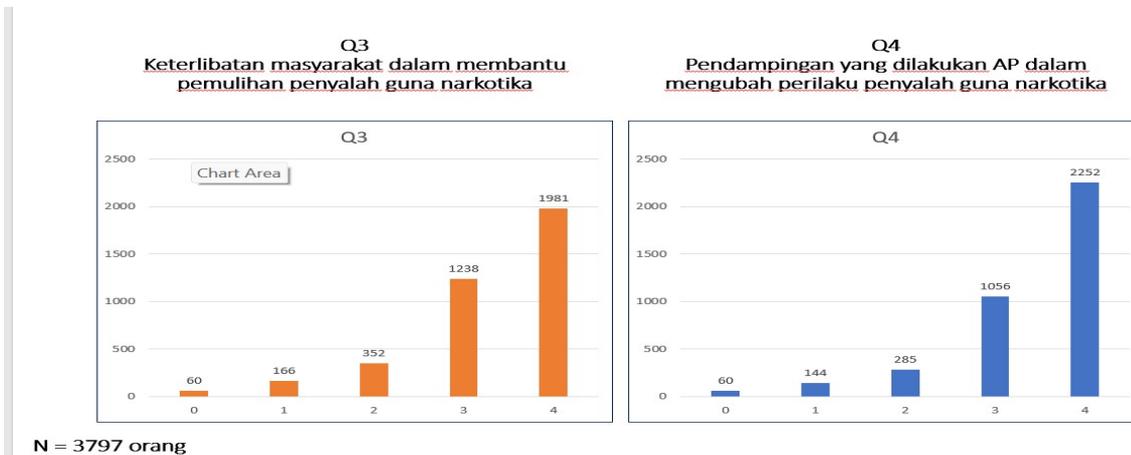
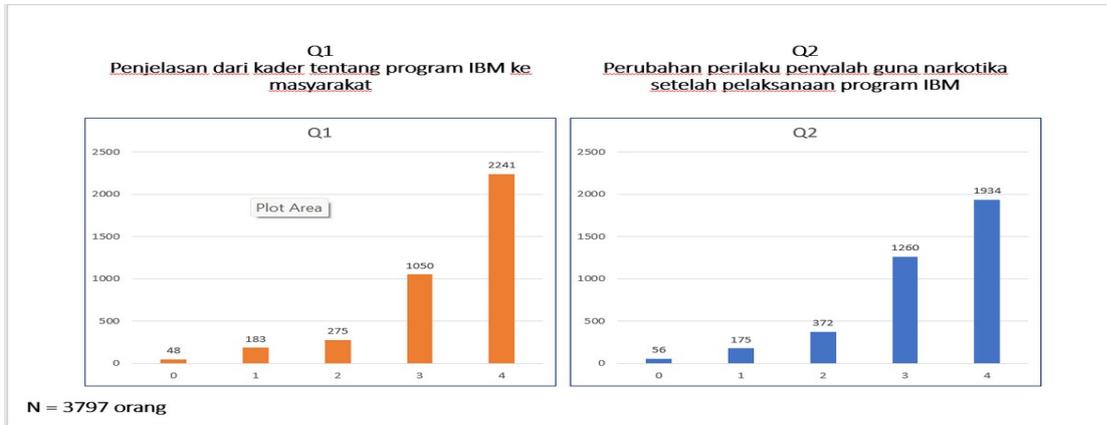
Mayoritas responden berada pada kelompok usia 36-45 tahun, dilanjutkan dengan selisih yang kurang signifikan dengan kelompok usia 26-35 tahun. Sebanyak 72% dari total responden merupakan warga masyarakat di lingkungan desa/ kelurahan Lokasi IBM.

B. Pengetahuan tentang IBM



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden (92,36%) mengetahui keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili

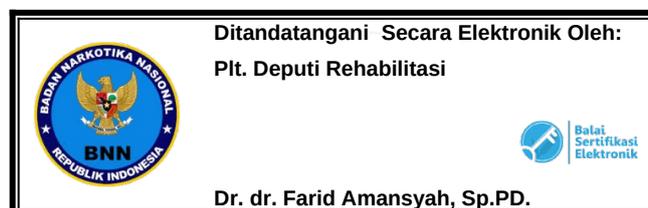
C. Hasil Pelaksanaan survey



Penjelasan hasil survey:

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	Penjelasan dari Agen Pemulihan tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	ada, cukup jelas maksud serta tujuan, dan cukup banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	2	3	5
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkoba setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Lebih menilai peran IBM terhadap dampak kepada lingkungan menurut pengamatan masyarakat	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan negatif, kegiatan perkumpulan para penyalah guna sudah tidak terlihat dan sudah jelas mereka sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus tingkat desa/ kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkoba dan banyak komponen masyarakat lain dalam jumlah yang banyak (lebih dari 5 orang)
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkoba di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna	Agen Pemulihan melakukan pendampingan, pemantauan dan pembimbingan secara bersungguh-sungguh pada penyalah guna narkoba
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkoba. Dengan melibatkan keluarga, keluarga dapat paham bahwa masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkoba dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	Agen Pemulihan melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, keluarga tidak lagi memandang negatif penyalahguna, dan keluarga berpartisipasi dengan mengajak keluarga lain atau masyarakat untuk mendukung IBM
6	Peran serta para penyalah guna narkoba yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalahguna narkoba mulai peduli dan terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat (pengajian, 17 Agustusan, dsb).	Sangat berperan dalam kegiatan



**FAKTOR PENDUKUNG & PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
2	3
1. Petugas Pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota	
Pemahaman yang komprehensif akan program IBM, termasuk alur kegiatan & layanan serta alokasi anggaran yang tersedia	Pendampingan unit IBM tidak menjadi prioritas karena banyaknya program bidang/ seksi Rehabilitasi yang harus dilakukan, dengan keterbatasan SDM yang dimiliki
Terjalannya hubungan baik dengan AP dan kepala desa/ lurah di lokasi IBM sebagai hasil dari tingginya intensitas koordinasi dan advokasi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media bukan hanya tatap muka	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.
2. Agen Pemulihan (AP)	
Kepedulian serta kesadaran diri dari AP di dukung oleh peran serta aktif dari lingkungan masyarakat sekitar akan dampak bahaya dari penyalahgunaan narkoba	Pemahaman yang kurang optimal serta ketidakpercayaan diri dalam melaksanakan program IBM
Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai AP	Pelaksanaan program IBM tidak menjadi prioritas karena AP disibukkan dengan pekerjaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya
3. Kepala Desa/ Lurah	
Komitmen, minat dan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan dalam bidang rehabilitasi penyalah guna narkoba	Program IBM tidak menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan
Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayahnya yang memerlukan penanganan segera	Penolakan data & informasi adanya masalah penyalahgunaan narkoba di wilayahnya



**DESA PELAKSANA
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024**

No	Nama Kelurahan/Desa	Kecamatan	Alamat IBM	Keterangan
1.	Desa Moyo Mekar	Moyo Hilir	Desa Moyo Mekar	

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
pada tanggal : 19 Februari 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sumbawa

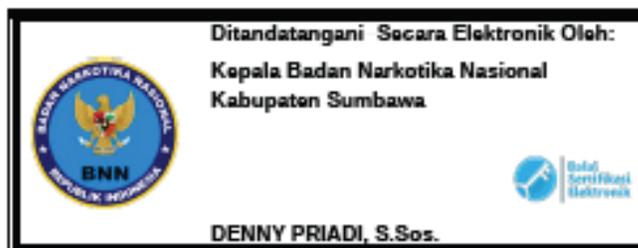


DENNY PRIADI, S.Sos.

**DESA PELAKSANA
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024**

No	Nama Kelurahan/Desa	Kecamatan	Alamat IBM	Keterangan
1.	Desa Plampang	Plampang	Desa Plampang	

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
pada tanggal : 19 Februari 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda Nomor 08 Telp/Fax. (0371) 21918 Sumbawa Besar

IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA

NOMOR : 630 /KLINIK PRATAMA/DPMPPTSP/VI/2024

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
 - c. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tanggal 5 September 2022;
 - d. Berdasarkan surat Sertifikat Standar Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 400.7.2.3/860/DUKES/V/2024 tanggal 12 Maret 2024;
 - e. Surat Permohonan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor B/147/VI/ka/rh.00.001/2024/BNNKab tanggal 20 Juni 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa.

MEMBERIKAN IZIN :

- Kepada :
Nama Sarana : **KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN SUMBAWA**
Alamat : Jalan Garuda No. 23 Kelurahan Lempoh Kecamatan
Sumbawa Kabupaten Sumbawa
Penanggungjawab
Klinik : **dr. Syamsul Amar Hidayat**
Nomor STR : 3511100123249597
Jenis Pelayanan : Rawat Jalan / Klinik Pratama
Izin ini berlaku sampai dengan tanggal Juni 2029.



Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 27 Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumbawa

RINI TRISNADI, SE, M. Si
Permana Tk. 1 IV/b
NIP. 19691001 199703 1 010

Terbaca disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa;
2. Arsip.

- BAI
- NAI
- NAI
- KAI
- SUI
- me
- (Sa
- Ker

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	418324	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA	100,00	98,99	99,50

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

- Dashi
- Monit
- User
- Infor

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	101	066	418324	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA	Nilai	100.00	94.59	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	79.19	80%	0.00	98.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.30		100.00				100.00				